



**PEMERINTAH
KABUPATEN KEBUMEN**

RENSTRA RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEBUMEN**



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi Pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 219);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 227);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

- 1) Rencana Strategis Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- 2) Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 2

Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercermin dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen lainnya dengan mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan Pemerintah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

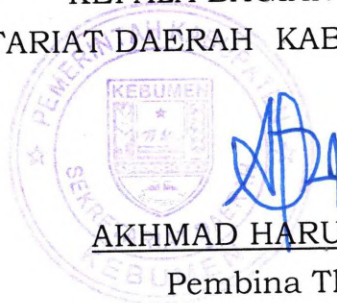
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 19 September 2025
BUPATI KEBUMEN,
ttd.
LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 19 September 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.
EDI RIAN TO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,



AKHMAD HARUN, S.H.

Pembina Tk. I

NIP 19690809 199803 1 006

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan anugerah-Nya Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 selesai disusun.

Dokumen Renstra ini merupakan wujud pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu perencanaan, dengan tetap memperhatikan isu strategis, tantangan, serta kebutuhan pembangunan daerah. Dokumen Renstra ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen selama 5 (lima) tahun ke depan dan menyediakan rencana program dan kegiatan setiap tahunnya yang termuat dalam Rencana Kerja (Renja).

Kami menyadari dokumen ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan dan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini diucapkan terimakasih.

Kebumen, 19 September 2025

Pt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kebumen



Nj. Wahyu Siswanti, S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197011071994032006

DAFTAR ISI

BAB I..... 1

PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan 4

1.3 Maksud dan Tujuan..... 9

1.4 Sistematika Penulisan..... 10

BAB II 12

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEBUMEN 12

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen..... 12

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah..... 17

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 32

2.4 Identifikasi Permasalahan 45

BAB III 48

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 48

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika . 48

BAB IV 54

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 54

4.1. Uraian Program 64

4.2. Uraian Kegiatan..... 65

4.3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif 66

4.4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan Daerah 77

4.5. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 80

4.6. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen..... 84

BAB V 86

PENUTUP..... 86

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan	18
Tabel 2. 2 Daftar Sumber Daya Sarana dan Prasarana	19
Tabel 2. 3 Data Sebaran Sumber Daya Sarana dan Prasarana	29
Tabel 2. 4 Data Sebaran Sumber Daya Sarana dan Prasarana	31
Tabel 2. 5 Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Kebumen	38
Tabel 2. 6 Pencapaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026	40
Tabel 2. 7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen	42
Tabel 2. 8 Mitra Dinas Kominfo Kab. Kebumen dalam Pemberian Layanan ..	44
Tabel 2. 9 Perumusan Permasalahan Pelayanan Dinas Kominfo Kab. Kebumen	45
Tabel 2. 10 Identifikasi Isu Strategis Dinas Kominfo Kab. Kebumen.....	47
Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen	49
Tabel 3. 2 Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kebumen TA 2026-2030	51
Tabel 3. 3. Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kebumen Tahun 2025-2030	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Indeks SPBE Tahun 2024 35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Strategis, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029 adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi arah, pedoman, dan acuan bagi penyelenggaraan pembangunan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian di Kabupaten Kebumen selama lima tahun. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan serta indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang berpedoman pada RPJPD Tahun 2025-2045 dan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berbasis digital.

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, penyusunan Renstra perangkat daerah meliputi:

1. Persiapan Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah;
2. Penyusunan Rancangan;
3. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dan Forum Konsultasi Publik;
4. Fasilitasi Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah;

5. Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

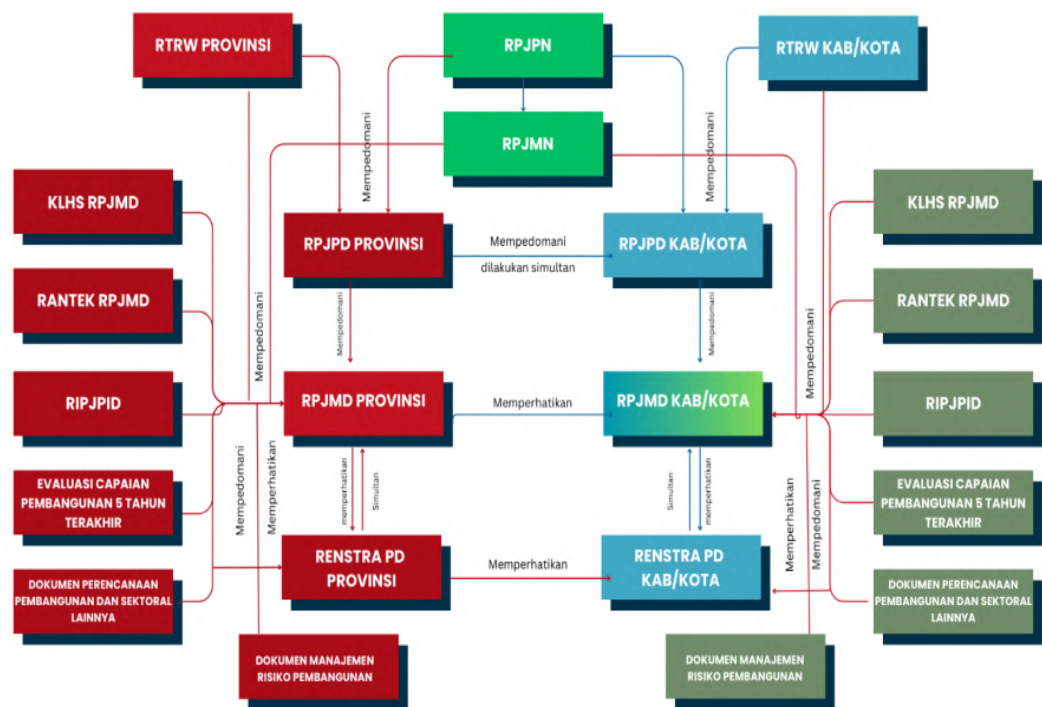
Selain mengacu pada pedoman RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen juga mengacu pada Renstra Kementerian/Lembaga yang memiliki tugas dan fungsi yang sejenis, antara lain Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun disusun untuk:

- 1) Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- 2) Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua *stakeholder* pembangunan dan masyarakat Kabupaten Kebumen;
- 3) Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten mengacu pada Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, sebagaimana Gambar 1.1.

Gambar 1.1. Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra PD Berdasarkan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025



Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen dan sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Kebumen dan dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah, Renstra Kementerian Komunikasi dan Digital, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, landasan hukum yang digunakan antara lain:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara;
20. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
21. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan

Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);

30. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024;
31. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 205);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 210);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 219);
39. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis disusun sebagai penjabaran secara operasional visi, misi, dan program Bupati yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen periode Tahun 2025-2029. Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menggambarkan kondisi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen saat ini dan masa mendatang selama 5 (lima) tahun ke depan;
2. Mensinkronisasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan khususnya Urusan Komunikasi dan Informasi, Urusan Statistik, dan Urusan Persandian;
3. Memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja tahunan dari tahun 2025-2029;

4. Mewujudkan artikulasi komunikasi dalam rangka penyampaian informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terintegrasi, terpadu dan berkesinambungan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 antara lain :

1. Memberikan gambaran, informasi sasaran strategis, permasalahan dan kondisi capaian pelayanan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
2. Menetapkan Program dan Kegiatan yang terukur sesuai pedoman tahapan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan;
3. Sebagai acuan dalam monitoring, pengendalian dan evaluasi serta kebijakan strategis capaian yang menjadi landasan penyusunan Program dan kegiatan 5 (lima) tahun mendatang.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYAAAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bab ini memuat gambaran pelayanan PD yang terdiri dari tugas, fungsi dan struktur PD, sumber daya PD, kinerja pelayanan dan kelompok sasaran layanan, permasalahan dan isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran Renstra PD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-

2029, strategi dan arah kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat tentang uraian program/ kegiatan/ subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif, uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Utama Kinerja (IKU) PD, dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEBUMEN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika diatur berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 122 Tahun 2021. Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas, Dinas menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana dan program di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi;
2. perumusan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi;
3. pelaksanaan koordinasi di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi;
4. pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi;
5. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi;
6. pelaksanaan administrasi Dinas;
7. pengendalian penyelenggaraan tugas UPT pada Dinas; dan
8. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan organisasi Dinas terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
4. Bidang Pengembangan Informatika; dan
5. UPT.

```
graph TD; KD[KEPALA DINAS] --- S[SEKRETARIAT]; KD --- BIKP[BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK]; KD --- BPI[BIDANG PENGEMBANGAN INFORMATIKA]; S --- SUK[SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN]; S --- SPDK[SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN]; SPDK --- KJF[KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL]; BIKP -.-> SKJF1[SUBKOORDINATOR DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL]; BPI -.-> SKJF2[SUBKOORDINATOR DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL]; SKJF1 --- UPT[UPT]; SKJF2 --- UPT[UPT];
```

Sebagaimana Gambar 2.1, masing-masing unsur dari organisasi Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a) pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- b) pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- c) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, protokol, penanganan aduan, arsip, perpustakaan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d) pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e) pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;
- f). pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g) penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Dinas;

- h) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Susunan organisasi Sekretariat terdiri atas:

- a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b) Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- c) Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

b. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi informasi dan komunikasi publik.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a) pengembangan komunikasi, informasi dan media massa;
- b) pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi;
- c) pelaksanaan kerjasama informasi dengan media massa;
- d) pengelolaan konten;
- e) pengelolaan saluran komunikasi publik milik Pemerintah Daerah;
- f) audit komunikasi pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- g) pengelolaan saluran komunikasi publik non Pemerintah Daerah;

- h) pengembangan kemitraan komunikasi dengan media di lingkup Daerah;
- i) pengembangan kapasitas komunikasi sosial pada komunitas strategis Daerah;
- j) pengelolaan database informasi publik;
- k) pengelolaan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah; dan;
- l) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Bidang Pengembangan Informatika

Bidang Pengembangan Informatika berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengembangan Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pengembangan Informatika mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengembangan informatika.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengembangan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a) layanan infrastruktur dasar data center;
- b) *disaster recovery center* dan teknologi informasi dan komunikasi;
- c) pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;
- d) layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah;
- e) pengembangan jaringan komunikasi dan informasi;
- f) penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi *smart city*;
- g) layanan nama domain dan subdomain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Pemerintah Daerah;
- h) layanan manajemen data dan informasi sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- i) pengembangan dan pengelolaan aplikasi umum dan khusus yang terintegrasi;
- j) integrasi layanan publik dan pemerintahan;

- k) penyelenggaraan *government chief information officer* Pemerintah Daerah;
- l) pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- m) pengembangan data statistik daerah;
- n) layanan keamanan informasi sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- o) pengendalian dan pengawasan serta pemberdayaan penyelenggaraan warung internet, warung seluler dan jasa telekomunikasi lainnya;
- p) pelaksanaan tata kelola jaminan keamanan informasi menggunakan persandian;
- q) tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- r) melaksanakan operasional pengamanan persandian di lingkungan Pemerintah Daerah;
- s) melaksanakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian di lingkungan Pemerintah Daerah;
- t) sosialisasi persandian dan keamanan informasi; dan
- u) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

d. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas didukung dengan sumber daya manusia dan asset/modal yang masih operasional.

a. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data kepegawaian, sampai dengan Bulan Agustus 2025, jumlah Sumber Daya Manusia (SDM)

yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen sebanyak 72 (tujuh puluh dua) orang yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang dan non ASN sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang.

Tabel 2. 1 Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		Laki-Laki	Perempuan	
1	SD	-	-	-
2	SMP	-	-	-
3	SMA	3	-	3
4	D3	3	-	3
5	S1	12	17	29
6	S2	1	2	3
Jumlah		19	19	38

Sumber: Dinas Kominfo Kab. Kebumen, 2025

Sumber daya manusia merupakan faktor penting untuk mewujudkan pelayanan prima. Berdasarkan data per September 2025 jumlah Apratur Sipil Negara (ASN) Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kebumen sebanyak tiga puluh delapan (38) orang. Berdasarkan tabel, tingkat pendidikan S1 merupakan tingkat pendidikan terbanyak yaitu berjumlah dua puluh sembilan (29) orang atau sebesar 76,32% yang terdiri dari 12 orang laki-laki dan tujuh belas (17) orang perempuan sedangkan tingkat pendidikan paling sedikit adalah pendidikan SLTA tiga (3) orang laki-laki, tingkat pendidikan D3 tiga (3) orang laki-laki, dan tingkat pendidikan S2 sejumlah 3 orang atau sebesar 7,89% terdiri dari 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan.

Tabel 2.2 Jumlah ASN Berdasarkan Golongan dan Pendidikan

No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Personil
1	Golongan I	-	-	-
2	Golongan II	3	-	3
3	Golongan III	10	6	16
4	Golongan IV	1	3	4
5	PPPK	9	6	15
Jumlah		23	15	38

Sumber: Dinas Kominfo Kab. Kebumen, 2025

Dari tabel 2.2 di atas dapat di lihat bahwa ASN yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen berjumlah 38 orang yang terdiri dari 23 orang PNS dan 15 orang PPPK, dengan golongan terbanyak adalah PNS golongan III yaitu sebanyak 16 orang atau sebesar 42%.

Selain ASN, terdapat 34 pegawai Dinas Kominfo yang berstatus Pegawai Perjanjian Kontrak (P2K), yang terdiri dari 19 orang laki-laki dan15 orang perempuan.

b. Kondisi Prasarana dan Sarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tupoksinya per Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Daftar Sumber Daya Sarana dan Prasarana

No	Sarana/Prasarana	Jml	Kondisi			Tahun Pengadaan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1107 m²	1			2012
	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	2913 m²	1			2012
	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	2610 m²	1			2015
2	Kendaraan Roda 4	6	5	1	-	
	- Toyota Avanza	2	2	-		2007
	- Toyota Inova	1	1	-	-	2023
	- Isuzu Mpustika	1	1	-	-	2013
	- Toyota Avanza	1	1	-	-	2013
	- Toyota Kijang SPR	1	-	1	-	2017
3	Kendaraan Roda 2	22	22	-	-	
	- HONDA / MCB/ WIN	1	1	-	-	2000
	- HONDA / Supra Fit	1	1	-	-	2004
	- HONDA / REVO	1	1	-	-	2007
	- Kawasaki KLX	1	1	-	-	2013
	- Honda VEGA RR / 5D9	3	3	-	-	2014
	- Kawasaki KLX	1	1	-	-	2014
	- Yamaha Vega ZR	1	1	-	-	2014
	- Yamaha / Jupiter Z F1	1	1	-	-	2015
	- Viar Karya	1	1	-	-	2019
	- Honda GTR	2	2	-	-	2018
	- Honda Vario 150	4	4	-	-	2018
	- HONDA SUPRA X 125 CW	2	2	-	-	2019

No	Sarana/Prasarana	Jml	Kondisi			Tahun Pengadaan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
	- HONDA VARIO 150 VIN CBS-ISS 2020	3	3	-	-	2019
4	Mesin Ketik	6	4	0	2	
	- Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)	1	-	-	1	2003
	- Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)	1	1	-	-	2008
	- Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	1	-	-	1	2012
	- Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	1	1	-	-	2015
	- Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	1	1	-	-	2017
	- Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	1	1	-	-	2018
5	Lemari	29	24	1	4	
	- Lemari Kayu	1	-	-	1	1977
	- Lemari Kayu	1	-	-	1	1980
	- Lemari Kayu	1	-	-	1	2002
	- Lemari Kayu	2	2	-	-	2003
	- Lemari Kayu	1	-	1		2004
	- Lemari Kayu	1	1	-	-	2004
	- Lemari Kayu	1	1	-	-	2007
	- Lemari Kayu	1	1	-	-	2008
	- Lemari Besi/Metal	2	1	-	1	2002
	- Lemari Besi/Metal	1	1	-	-	2008
	- Lemari Besi/Metal	1	1	-	-	2002
	- Lemari Besi/Metal	5	5	-	-	2012
	- Lemari Besi/Metal	1	1	-	-	2017
	- Lemari Besi/Metal	1	1	-	-	2018
	- Lemari Besi/Metal	2	2	-	-	2023
	- Lemari Kaca	1	1	-	-	2004
	- Lemari Kaca	1	1	-	-	2008
	- Lemari Kaca	2	2	-	-	2019
	- Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	1	-	-	2015
	- Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2	2	-	-	2019
6	Filing Kabinet	7	3	0	4	
	- Filing Cabinet Besi	1	-	-	1	2003
	- Filing Cabinet Besi	3	-	-	3	2004
	- Filing Cabinet Besi	1	1	-	-	2012
	- Filing Cabinet Besi	1	1	-	-	2019
	- Filing Cabinet Besi	1	1	-	-	2020
7	Rak	26	22	-	4	
	- Rak Besi	2	-	-	2	2002
	- Rak Besi	1	1	-		2003

No	Sarana/Prasarana	Jml	Kondisi			Tahun Pengadaan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
	- Rak Besi Rak End T150 P90 (1+3)	6	6	-		2019
	- Rak Besi Single T 180 adjoining (1+4)	9	9	-	-	2019
	- Rak Besi Single T 181 starting (1+4)	3	3	-	-	2019
	- Rak Besi Single T 181 starting (2+6)	2	2	-	-	2019
	- Rak Kayu	2	-	-	2	2003
	- Rak Kayu	1	1	-	-	2007
8	Kursi	252	189	2	61	
	- Kursi Putar Lufo	3	-	-	3	2003
	- Kursi putar	1	1	-	-	2005
	- Kursi Putar Lufo	1	1	-	-	2008
	- Kursi Putar	1	1	-	-	2009
	- Kursi Putar	2	-	-	2	2015
	- Kursi Talkshow	4	4	-	-	2017
	- Kursi Besi/ Metal Chitose	1	-	1	-	2006
	- Kuri besi/Metal Futura	1	1	-	-	2006
	- Kursi Besi/ Metal Chitose	26	25	1	-	2007
	- Kursi besi/Metal	33	-	-	33	2007
	- Kursi besi/Metal	1	1	-	-	2010
	- Kursi Besi/Metal Chitose	8	8	-	-	2012
	- Kursi Besi/Metal Futura	4	4	-	-	2012
	- Kursi Besi/Metal	52	52	-	-	2018
	- Sice	1	-	-	1	2002
	- Sice	4	4	-	-	2003
	- Kursi Lipat Futura	8	-	-	8	2008
	- Kursi Lipat Chitose	14	14	-	-	2010
	- Kursi Lipat	35	35	-	-	2020
	- Sofa	1	1	-	-	2015
	- Sofa	1	1	-	-	2016
	- Sofa	2	2	-	-	2019
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	1	-	-	2018
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	2	-	-	2018
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	3	3	-	-	2015
	- Kursi Kerja Pejabat lainnya	6	6	-	-	2015
	- Kursi Kerja Pejabat lainnya	12	12	-	-	2018
	- Kursi Kerja Pejabat lainnya	10	10	-	-	2019
	- Kursi Kayu	1			1	1986
	- Kursi Kayu	5	-	-	5	2000
	- Kursi Kayu	4	-	-	4	2012
	- Bangku Tunggu	4	-	-	4	1980
9	Meja	105	78	9	20	
	- Meja Panjang	4	4	-	-	2000
	- Meja Panjang	2	2	-	-	2004
	- Meja Kerja Kayu	2	2	2		2002
	- Meja Kerja Kayu	6	4	-	2	2003

No	Sarana/Prasarana	Jml	Kondisi			Tahun Pengadaan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
	- Meja Kerja Kayu	12	1	-	11	2004
	- Meja Rapat	13	10	3	-	2012
	- Meja 1/2 Biro	3			3	1980
	- Meja 1/2 Biro	1			1	1990
	- Meja 1/2 Biro	4	3		1	1997
	- Meja 1/2 Biro	2	2	-	-	2002
	- Meja 1/2 Biro	1			1	2003
	- Meja 1/2 Biro	6	6	-	-	2008
	- Meja Panjang	4	-	4	-	2012
	- Meja Bundar	1	-	-	1	2002
	- Meja Bundar	1	1	-	-	2003
	- Meja Resepsionis	1	1	-	-	2003
	- Meja Tambahan/ Takshow	1	1	-	-	2020
	- Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	1	-	-	2018
	- Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	2	-	-	2018
	- Meja Kerja Pejabat Eselon VI	3	3	-	-	2015
	- Meja Kerja Pejabat Eselon VI	6	6	-	-	2017
	- Meja Kerja Pejabat Eselon VI	4	4	-	-	2018
	- Meja Kerja Pegawai Non Struktural	20	20	-	-	2019
	- Meja Kerja Pejabat lain-lain	4	4	-	-	2015
	- Meja Kerja Besi/Metal	1	1	-	-	2003
10	LCD	12	6	-	6	
	- LCD Projector/Infocus BenQ	1		-	1	2008
	- LCD Projector/Infocus	6	2	-	4	2009
	- LCD Projector/Infocus LG	2	1	-	1	2009
	- LCD Projector/Infocus	1	1	-	-	2019
	- LCD Projector/Infocus EPSON Projector EB-970	2	2	-	-	2020
11	Televisi	17	5	-	12	
	- Televisi JVC	1	-	-	1	2003
	- Televisi Sanyo	1	1	-	-	2003
	- Televisi Panasonic 21 inch	1	-	-	1	2008
	- Televisi Panasonic 42 inch	1	-	-	1	2008
	- Televisi JVC 14 inch	1	-	-	1	2008
	- Televisi Sony	1	1	-	-	2008
	- Televisi Akari 14 inch	8	-	-	8	2013
	- Televisi	1	1	-	-	2018
	- Televisi	2	2	-	-	2019
12	AC Unit	61	44	-	17	

No	Sarana/Prasarana	Jml	Kondisi			Tahun Pengadaan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
	- A.C. Window Panasonic 2,5 PK	3	-	-	3	2003
	- A.C. Window Panasonic 2,5 PK	1	-	-	1	2004
	- A.C. Window Panasonic 1 PK	7	-	-	7	2007
	- A.C. Window 2,5 PK	2	1	-	1	2008
	- A.C. Window Changhong 1,5 PK	1	1	-	-	2008
	- A.C. Window GREE 1,5 PK	1	-	-	1	2008
	- A.C. Window 2,5 PK	1	1	-	-	2012
	- A.C. Window SHARP 1 PK	4	-	-	4	2014
	- A.C. Window Panasonic 1,5 PK	1	1	-	-	2015
	- A.C. Window LG 1,5 PK	3	3	-	-	2016
	- A.C. Window	11	11	-	-	2019
	- A.C. Window Daikin Floor Standing 6 PK	11	11	-	-	2019
	- A.C. Split Panasonic 1PK	4	4	-	-	2017
	- A.C. Split Gree 2 PK	4	4	-	-	2017
	- A.C. Split Panasonic 22,5 PK	2	2	-	-	2017
	- A.C. Panasonic	4	4	-	-	2019
	- A.C. Panasonic 1,5 PK	1	1	-	-	2023
13	PC	47	37	-	8	
	- P.C Unit Acer	1	-	-	1	2002
	- P.C Unit Intel	1	-	-	1	2002
	- P.C Unit Philips	1	-	-	1	2002
	- P.C Unit Acer	1	-	-	1	2003
	- P.C Unit ABE / LT 1100	1	1	-	-	2003
	- P.C Unit Samsung	1	1	-	-	2007
	- P.C Unit	1	-	-	1	2007
	- P.C Unit	3	-	-	1	2009
	- P.C Unit Acer	1	1	-	-	2009
	- P.C Unit	3	1	-	2	2012
	- P.C Unit LG	1	1	-	-	2013
	- P.C Unit	1	1	-	-	2013
	- P.C Unit AMD Fishefera V 2	1	1	-	-	2014
	- P.C Unit	2	2	-	-	2014
	- P.C Unit XLR	1	1	-	-	2014
	- P.C Unit DELL	1	1	-	-	2015
	- P.C Unit Lenovo	1	1	-	-	2015
	- P.C Unit	2	2	-	-	2015
	- P.C Unit Asus	2	2	-	-	2016
	- P.C Unit	3	3	-	-	2017
	- PC Unit / Intel Pentium 2GB,500GB,DVD, Gygabyte	2	2	-	-	2018
	- PC Unit / Asus AIO TCV221 IDUK BA028D	2	2	-	-	2018

No	Sarana/Prasarana	Jml	Kondisi			Tahun Pengadaan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
	- P.C Unit	6	6	-	-	2018
	- P.C Unit	5	5	-	-	2019
	- P.C Unit DELL	2	2	-	-	2019
	- P.C Unit Acer / Veriton X	1	1	-	-	2023
14	Laptop dan notebook	92	81	5	6	
	- Laptop	1	-	-	1	2008
	- Laptop HP MINI 1101431 TO	4	4	-	-	2014
	- Laptop HP	1	-	-	1	2014
	- Laptop Asus	2	-	-	2	2015
	- Laptop	1	1	-	-	2017
	- Laptop HP Spectre	1	-	1	-	2017
	- Laptop / HP 14BS007TX	2	2	-	-	2018
	- Laptop / Lenovo TP13-1ID	7	7	-	-	2018
	- Laptop / Asus Grafis	1	1	-	-	2018
	- Laptop / Acer Aspire E547531 TQ	4	4	-	-	2018
	- Laptop	2	2	-	-	2019
	- Laptop Dell Inspiron 14 5482	5	4	-	1	2019
	- Laptop Lenovo Business ThinkPad X1 C5	3	3	-	-	2019
	- Laptop Asus Core 15 DDR 4	5	5	-	-	2021
	- Laptop ASUS ROG / Strix G5	10	10	-	-	2021
	- Laptop Acer / Travelmate P214 I5	1	1	-	-	2023
	- Laptop Acer / Travelmate P214 I7	5	5	-	-	2023
	- Laptop Acer /Predator Helios Neo 16	4	4	-	-	2024
	- Note Book Samsung tab 2	2	1	1	-	2013
	- Note Book Asus	1	-	1	-	2013
	- Note Book Toshiba	1	-	1	-	2013
	- Notebook Apple	1	-	-	1	2013
	- Note Book HP	1	-	1	-	2014
	- Note Book Lenovo	5	5	-	-	2015
	- Note Book	5	5	-	-	2017
	- Note Book / Intel Core I3 Gb,500Gb,DVD	1	1	-	-	2018
	- Note Book / Del Vostro 3468	9	9	-	-	2018
	- Note Book Asus X505Z-BR301T	3	3	-	-	2019
	- Asus TP412UA-EC30IT	1	1	-	-	2019
	- Note Book Asus i7 / 8565U/8GB	3	3	-	-	2020
15	Kamera	37	29	4	4	

No	Sarana/Prasarana	Jml	Kondisi			Tahun Pengadaan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
	- HANDYCAM DIRUNG BERITA RATIH TV	1	1	-	-	2009
	- Camera Panasonic	2	1	1	-	2013
	- Camera Film	3	-	-	3	2013
	- SONY PROFFESIONAL / DCR SD 1000 E	2	1	1	-	2014
	- Camera Video	1	-	-	1	2015
	- Nikon D5500	2	1	1	-	2016
	- Sony Profesional Nex VG30EH KIT 18-200MM Camera	3	3	-	-	2017
	- Camera Video / Camcoder	5	4	1	-	2018
	- Camera + Attachment / Panasonic Handycam HC W585	1	1	-	-	2018
	- Camera + Attachment / Canon EOS 1300D	2	2	-	-	2018
	- Camera + Attachment / Panasonic HC-V385	1	1	-	-	2018
	- Camera + Attachment / Camera Video Sony VXWX70	2	2	-	-	2018
	- Camera Video	4	4	-	-	2019
	- Handy Cam Panasonic	2	2	-	-	2017
	- Handy Cam	1	1	-	-	2019
	- Handy Cam Sony Profesional / PD177	2	2	-	-	2020
	- Kamera Miroless Body Only Sony A74 Mark 4	2	2	-	-	2024
	- Sony PXW-Z90 4K HDR XDCAM	1	1	-	-	2024
16	Teleprompter	2	2	-	-	
	- Teleprompter	2	2	-	-	2019
17	Microphone	40	40	-	-	
	- Microphone	1	1	-	-	2015
	- Microphone Sennhaiser Evolution 900	2	2	-	-	2015
	- Microphone	4	4	-	-	2019
	- Microphone	2	2	-	-	2020
	- Microphone condenser	6	6	-	-	2021
	- Microphone wireless Clip On DSLR Camcoder	3	3	-	-	2021

No	Sarana/Prasarana	Jml	Kondisi			Tahun Pengadaan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
	- Microphone/Wireless MIC WESTON / HANDLED	1	1	-	-	2009
	- Microphone/Wireless KREZT/CM1001	4	4	-	-	2015
	- Microphone/Wireless SHURE LX 88 1 Mic Wireless 1 Mic Clip on	5	5	-	-	2017
	- Microphone/Wireless MIC	1	1			2017
	- Microphone/Wireless MIC Intercom 5 CH	1	1			2017
	- Microphone/Wireless MIC Microphone Siaran	3	3	-	-	2017
	- Microphone/Wireless MIC Senheizer MD421	3	3	-	-	2018
	- Microphone/Wireless MIC	2	2	-	-	2019
	- Microphone/Wireless MIC	2	2	-	-	2023
18	Mixer Audio	7	7	-	-	
	- Audio Mixing Portable / Yamaha	5	5	-	-	2021
	- Audio Mixing Portable/Yamaha / MG10XU	2	2	-	-	2020
	- Audio mixer 24 Ch With effect	1	1	-	-	2021
19	Mixer Video	7	5	0	2	
	- YAMAHA / MG 166 EX	1	-	-	1	2008
	- Video Mixer BEHRINGER	1	1	-	-	2009
	- Video Mixer PANASONIK / AG MX 70	1	-	-	1	2009
	- YAMAHA MGP 24X	1	1	-	-	2015
	- Video Mixer Data Video SE-600	1	1	-	-	2016
	- Video Mixer	2	2	-	-	2019
20	Tripod	25	24	0	1	
	- Tripod Camera Miler	1	-	-	1	2008
	- Tripod Kamera	1	1	-	-	2013
	- ESPOD CX203AP	2	2	-	-	2016
	- Tripod E_IMAGE	3	3	-	-	2016
	- Tripod Somita ST650	3	3	-	-	2018
	- Tripod Kamera	4	4	-	-	2019
	- Tripod Camera Manfrotto	2	2	-	-	2020
	- Tripod Camera table	1	1	-	-	2020
	- Tripod Kamera	4	4	-	-	2021

No	Sarana/Prasarana	Jml	Kondisi			Tahun Pengadaan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
	- Tripod Camera	1	1	-	-	2020
	- Tripod Camera EA2TT / VT-888	1	1	-	-	2023
	- Tripod Camera Vanguard Vesta 204AP	1	1	-	-	2024
	- Lighting Stand Tripot	1	1	-	-	2024
21	Drone	5	3	2	-	
	- Drone Camera DJI INSPIRE 1+3 Batree	1	-	1	-	2017
	- Drone	1	-	1	-	2018
	- Drone DJI / Mini 4 Pro Combo Plus	1	1	-	-	2023
	- DJI Air 3 Fly More Combo (DJI RC 2) (Dron)	1	1	-	-	2024
	- DJI RS3 Combo I Ronin S3 (Gimbal)	1	1	-	-	2024
22	Printer	43	37	1	5	
	- Laser Jet HP	1	-	-	1	2009
	- Laser jet	2	1	-	1	2012
	- EPSON / L 110	1	-	1	-	2013
	- Printer inkjek	1	-	-	1	2013
	- Epson L210	1	1	-	-	2014
	- HP DESJET 4645	1	1	-	-	2015
	- Printer	1	1	-	-	2015
	- Printer Canon Pixma G2000	1	1	-	-	2017
	- Printer Lasajet colour Pro M177	2	2	-	-	2017
	- Printer / HP Laserjet M130 MFP A4	1	1	-	-	2018
	- Printer warna inkjet All In One	5	3	-	2	2018
	- Printer Epson	1	1	-	-	2018
	- Printer / Epson L565	3	3	-	-	2018
	- Epson Dotmatrix LX310	1	1	-	-	2018
	- Printer / Ink Jet Warna	2	2	-	-	2018
	- Printer warna inkjet All In One	5	5	-	-	2019
	- Printer Dot Matrix	1	1	-	-	2019
	- Printer Barcode	1	1	-	-	2019
	- Printer	2	2	-	-	2019
	- Printer Epson LX310 M	1	1	-	-	2020
	- Printer Epson L3110	5	5	-	-	2020
	- Printer Epson L3110	2	2	-	-	2021
	- Printer All in one Epson L5190	1	1	-	-	2021
	- Printer Epson / Ecotank L4260	1	1	-	-	2023

No	Sarana/Prasarana	Jml	Kondisi			Tahun Pengadaan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
23	Genset	3	3	-	-	
	- ATS/AMF Genset Kapasitas 135 KVA	1	1	-	-	2019
	- Genset Kapasitas 100 KVA	1	1	-	-	2019
	- Genset / Diesel 4000Watt, 1PH, Silent	1	1	-	-	2018
24	Unit Pemancar	10	10	-	-	
	- Antena Pemancar Di Studio Pemancar Bumiagung	1	1	-	-	2009
	- Exitter Tv UHF di Gudang Ratih Tv	1	1	-	-	2009
	- EGATEL / TAE 7502A	1	1	-	-	2015
	- MOYANO / MY-PDL 1000-4H	1	1	-	-	2015
	- Grounding System di Lokasi Pemancar TV Bumiagung	1	1	-	-	2015
	- PROMAX / EXPLORER HD+	1	1	-	-	2015
	- LINIER / DKL-5/7	1	1	-	-	2015
	- ANDREW / AVA7-50.	1	1	-	-	2015
	- POLYTRON MINI HIFI / XL 2900 RC	1	1	-	-	2015
	- POLYTRON MINI HIFI / XL 2900 RC	1	1	-	-	2015

Sumber: Dinas Kominfo Kab.Kebumen

Sebagai Dinas yang banyak menggunakan perangkat teknologi terkait komunikasi dan informatika, Dinas Kominfo selalu memperhatikan perkembangan jaman dan teknologi. Peliputan berita, penayangan acara di TV dan Radio, pembangunan data *center*, pengembangan sistem informasi serta jaringan, dan dukungan untuk acara vidcon membutuhkan dukungan sarana prasarana yang baik dari perangkat yang dimiliki. Namun yang perlu diperhatikan juga adanya kemungkinan alat yang tiba-tiba rusak pada saat pemakaian, untuk setidaknya memiliki alat cadangan untuk menggantikan alat-alat tersebut segera.

Ketersediaan sarana dan prasarana dapat mencukupi kebutuhan minimal untuk mendukung

kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen. Dalam tabel 2.2 di atas dapat dilihat bahwa ada beberapa barang yang sudah tidak layak dipakai dan mengusulkan penghapusan.

Dengan adanya tuntutan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang semakin besar maka perlu dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Sehingga perlu dianggarkan untuk penambahan atau pengadaan baru dan penggantian sarana dan prasarana yang rusak. Adapun barang-barang yang rusak diantaranya adalah mesin ketik manual Langewagon (18-27 inci) 1 buah, mesin ketik manual *portable* (11-13 inci) 1 buah, lemari kayu 4 buah, *filing cabinet* besi 4 buah, rak besi 2 buah, kursi putar Lufo 3 buah, kursi putar 2 buah, kursi besi/metal 33 buah, sice 1 buah, kursi lipat futura 8 buah, kursi kayu 10 buah, bangku tungku 4 buah, meja kayu 13 buah, meja ½ biro 5 buah, meja bundar 1 buah, LCD 6 buah, televisi 12 unit, AC 17, PC 8 unit, laptop dan *notebook* 6 unit, camera 4 unit, mixer video 2 unit, tripod 1 unit, dan printer 5 unit. Adapun tambahan lemari arsip 1 unit, rak besi 1 unit, mixer video 1 unit, mixer audio 1 unit, kamera 4 unit, lensa kamera 3 unit, laptop 4 unit, printer 2 unit, AC 4 unit, scanner 1 unit, TV LED 43” 1 unit, pengadaan peralatan dan mesin lainnya sebanyak 40 unit dari tahun 2022-2025.

Tabel 2. 3 Data Sebaran Sumber Daya Sarana dan Prasarana

No	Nama Dinas	Aset						Tahun Pengadaan
		Router	Wifi	UPS	Box Wallmount	Radio	Switch	
1	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	2	1		1		3	2016/2023
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3	3	1	1		4	2015/2023
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	2	1		1		4	2015
4	Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2	4		1		3	2016/2023
5	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3	2		1		3	2016/2023
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	1				1	2015/2023
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2	4		1		1	2015/2023
8	Dinas Perhubungan	3	3		1		3	2015/2022/2023
9	Dinas Pendidikan	3	1		1			2015
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	3	11		1		7	2015

No	Nama Dinas	Aset						
		Router	Wifi	UPS	Box Wallmount	Radio	Switch	Tahun Pengadaan
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	4		1		4	2015/2022
12	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	2	4		1		4	2015/2022/2024
13	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1	1		1		3	2015/2022
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	2	2		1		2	2016/2022
15	Dinas Pertanian dan Pangan	2	6		1		5	2015/2021/2022
16	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2	3		1		4	2015/2023
17	Dinas Kesehatan	3	6		1		4	2015/2021/2022/2023
18	Inspektorat	2	4		1		2	2016/2022/2024
19	Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah	4	5		1		4	2015/2022/2023
20	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4	6		1		5	2015/2023/2024
21	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1	3		1		2	2015/2020/2022
22	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	1	1		1		2	2015/2021/2023
22	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	1	1		1		2	2015/2021/2022
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	3		1		3	2016/2023/2024
24	Satpol PP	2	4		1		3	2016/2023
25	RSU PREMBUN	1				1		-
26	RSU dr. SOEDIRMAN	4	2	1	2		1	2016/2020/2022
27	DEWAN DPRD	1	5		1		3	2015/2023/2024
28	Bagian Humas	1	1				1	2015/2020
29	Bagian Pemerintahan	1		1	1		2	2015
30	Bagian Hukum	1	1				2	2015
31	Bagian Pembangunan	1					1	2015
32	Bagian Perekonomian	1					1	2015
33	Bagian Kesra	1	1				1	2015
34	Bagian Organisasi	1					1	2015
35	Bagian Umum	2	3				2	2015/2019/2021/2024
36	Bagian Pengadaan	1	2				3	2015
37	Ruang Sekda	1	3		1		2	2015/2022/2023
38	Bagian Asisten 1	1	1				1	2015
39	Bagian Asisten 2	1	1					2015/2022
40	Gedung Press Center	1	1				1	2015/2020
41	Gedung F	1	1				3	2015
42	Setwan	1	1		1		1	2015
43	Sekretariat KPU	1	1				1	2016/2021
JUMLAH		76	108	3	30	1	105	

Sumber: Dinas Kominfo Kab.Kebumen

Dari Tabel 2.3, sebaran jaringan internet yang berada di dalam Kota Kebumen sudah mencakup semua Perangkat Daerah. Kebutuhan pengelolaan data untuk mendukung implementasi aplikasi pemerintahan dan layanan umum sudah tercukupi.

Mendasari data sebaran jaringan internet tersebut, dapat dianalisa bahwa kebutuhan jaringan internet untuk mendukung pengelolaan data dan informasi serta layanan elektronik di Perangkat Daerah yang berlokasi di dalam wilayah kota (Kecamatan Kebumen dan Kecamatan Pejagoan) sudah dikembangkan dengan baik, dengan menggunakan kabel *fiber optic*.

Tabel 2. 4 Data Sebaran Sumber Daya Sarana dan Prasarana

No	Kecamatan	Jenis Jaringan		Aset					Tahun Pegada an
		Wireless	FO	Router	Wifi	UPS	Box Wallmound	Radio	
1	Kebumen		ya	1	2	1	1		2015/ 2023
2	Karanganyar	ya		1	2	1	1	1	2007/ 2023
3	Kutowinangun	ya		1	3	1	1	1	2007/ 2023
4	Buluspesantren		ya	1	3	1	1		2018/ 2023
5	Gombang	ya		1	2	1	1	2	2007/ 2022
6	Ambal		ya	1	3	1	1	3	2018/ 2023
7	Pejagoan		ya	1	2	1	1		2015/ 2023
8	Petanahan		ya	1	3	1	1	2	2019/ 2022
9	Karanggayam	ya		1	3	1	1	1	2010/ 2022
10	Puring		ya	1	3	1	1	4	2019/ 2022/ 2023
11	Adimulyo	ya		1	3	1	1	2	2007/ 2022/ 2024
12	Kuwarasan	ya		1	2	1	1	1	2007/ 2024
13	Sempor	ya		1	3	1	1	1	2007/ 2022
14	Buayan	ya		1	2	1	1	1	2007/ 2024
15	Rowokele	ya		1	2	1	1	2	2010/ 2022
16	Karangsambung	ya		1	2	1	1	2	2010/ 2023/ 2024
17	Prembun	ya		1	5	1	1	1	2007/ 2021/ 2022/ 2024
18	Padureso	ya							
19	Alian	ya		1	3	1	1	2	2010/ 2022
20	Sadang	ya		1	3	1	1	1	2010/ 2023
21	Poncowarno	ya		1	2	1	1	1	2010/ 2021
22	Klirong		ya	1	3	1	1	1	2019/ 2021/ 2023
23	Sruweng	ya		1	2	1	1	1	2007/ 2024
24	Ayah	ya		1	3	1	1	1	2010/ 2022
25	Mirit		ya	1	3	1	1	1	2018/ 2024
26	Bonorowo	ya		1	2	1	1	1	2007/ 2022
JUMLAH		18	8	25	66	25	25	33	

Sumber: Dinas Kominfo Kab.Kebumen

Dari tabel di atas menunjukan semua Kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Kebumen sudah terkoneksi jaringan internet milik Pemerintah Kabupaten Kebumen, meliputi delapan belas kantor kecamatan dengan jaringan kabel *fiber* optic, dan delapan kecamatan dengan jaringan *wireless*.

Berdasarkan data sebaran jaringan di semua kantor kecamatan tersebut, dapat dianalisa bahwa sebaran jaringan di delapan belas kecamatan sudah cukup untuk melayani layanan elektronis masyarakat dengan kualitas yang baik, namun masih ada delapan kecamatan yang

kualitas jaringan internetnya masih memerlukan pengembangan karena menggunakan jaringan *wireless* yang sering mengalami permasalahan pada penerimaan sinyal di lokasi kantor kecamatan tersebut.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 122 Tahun 2021, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian yang menjadi kewenangan Daerah.

a. Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan komunikasi dan informatika di tingkat Kabupaten Kebumen mendapatkan tugas untuk mengoptimalkan pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi di tingkat pemerintah dalam rangka peningkatan dan kemudahan pelayanan publik. Hal ini tercermin dari Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yaitu penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Penilaian indeks SPBE dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu terkait kemudahan dan kenyamanan yang diterima pengguna SPBE. Semakin tinggi tingkat kematangan layanan SPBE menunjukkan semakin mudah dan nyaman bagi pengguna SPBE dalam menerima layanan dari sistem aplikasi yang disediakan oleh instansi pusat dan daerah. Dalam hal ini, sistem aplikasi harus dapat diakses oleh pengguna SPBE secara daring. Indeks SPBE Kabupaten Kebumen mengalami peningkatan dari 3,42 atau kategori baik pada tahun 2020 menjadi 4,07 atau telah masuk kategori sangat baik pada tahun 2024. Pada tahun 2021 terjadi perubahan penilaian indeks, sehingga nilai SPBE Kabupaten Kebumen tahun 2021 lebih rendah dari tahun 2020. Selain itu, dalam upaya mengoptimalkan pelayanan publik berbasis *e-government* perlu terus dilakukan

peningkatan jangkauan *fiber optic* untuk mendukung pelayanan Pemerintah Kabupaten Kebumen, kualitas dan kuantitas sarana teknologi informasi (*server*, sarana dan prasarana), serta profesionalitas SDM dalam bidang TIK baik di Dinas Kominfo maupun perangkat daerah. Capaian indeks SPBE Kabupaten Kebumen tahun 2020-2024 secara detail dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.5. Capaian Urusan Kominfo

Indikator Kinerja	Sat.	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	3,42	3,05	3,44	3,70	4,07
	Kategori	baik	baik	baik	Sangat baik	Sangat baik
Persentase Rumah Tangga dengan akses internet	%	74,95	80,77	90,82	82,31	89,41

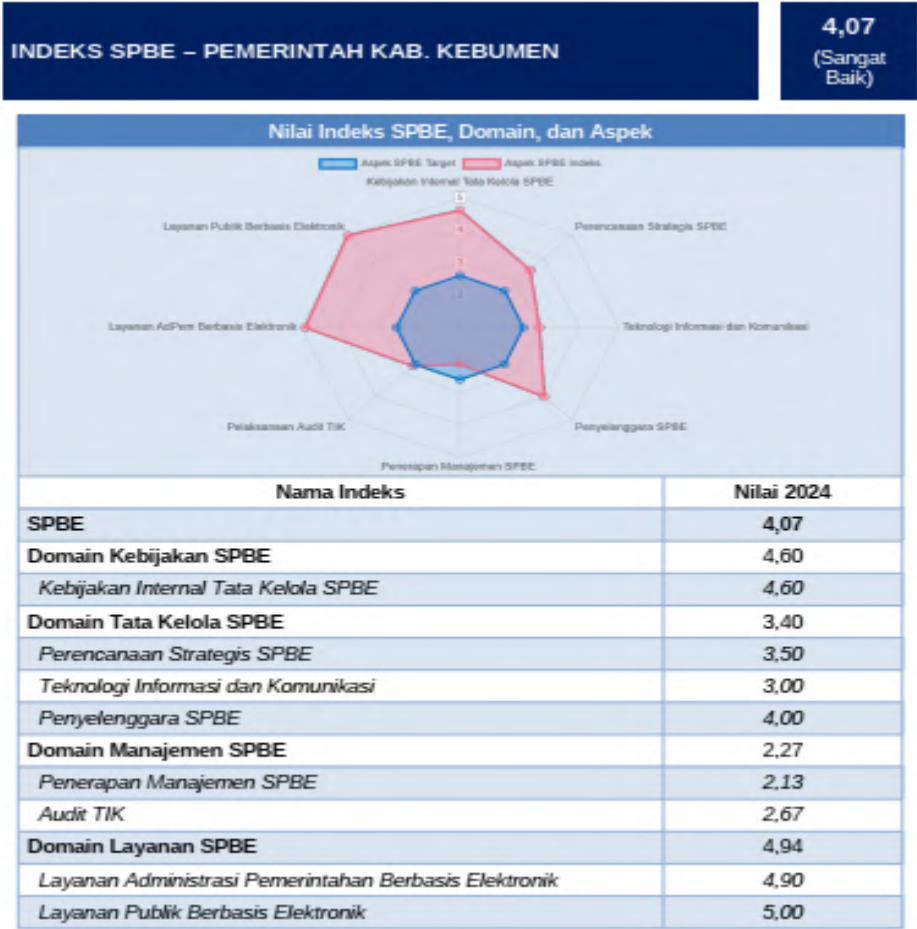
Sumber: Satu Data Kab. Kebumen Tahun 2024

Selain itu, akses masyarakat umum terhadap teknologi informasi dalam hal ini internet juga harus terus ditingkatkan karena kemudahan akses ini dapat membantu aktivitas masyarakat baik sosial, budaya maupun ekonomi. Hal ini tercermin dari persentase rumah tangga dengan akses internet yang pada Tahun 2024 telah mencakup 89,41%. Selain kemudahan, keamanan dan pemanfaatan yang bersifat positif terhadap akses internet oleh masyarakat juga perlu ditingkatkan agar tidak menimbulkan masalah sosial, budaya dan ekonomi di tengah masyarakat.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai

dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi ini diharapkan dapat digunakan dalam menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi dan keterpaduan SPBE.

Gambar 2. 1 Indeks SPBE Tahun 2024



Sumber: Portal SPBE Nasional (spbe.go.id), 2024

Kabupaten Kebumen telah menerapkan *e-government* melalui aplikasi-aplikasi yang diterapkan di perangkat daerah. Penerapan *e-government* ini diharapkan dapat mendukung efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik, mendukung reformasi birokrasi, mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat memperkecil kemungkinan terjadinya praktik korupsi karena keberadaan TIK mampu memfasilitasi pemerintah untuk memecahkan berbagai kelemahan birokrasi di dalam menjalankan tugasnya yang menyangkut perencanaan, penganggaran, koordinasi dan pengawasan.

Dari 134 aplikasi *e-government*, 98 berstatus aktif dan 36 tidak aktif yang telah dikelola dan dikembangkan Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Kebumen. Aplikasi yang berbasis *web* sebanyak 129 dan 5 aplikasi berbasis desktop. Banyak dari aplikasi tersebut masih berdiri sendiri dan belum terintegrasi satu dengan lainnya, sehingga PD masih harus menginput data di masing-masing aplikasi.

Gambaran kinerja urusan komunikasi dan informatika juga dapat dilihat dari ketersediaan prasarana pendukung teknologi. Sampai dengan tahun 2024, infrastruktur digital di Kabupaten Kebumen sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari kondisi dimana seluruh PD dan kecamatan telah terkoneksi jaringan internet. Namun demikian masih ada permasalahan ketersediaan jaringan internet di kantor desa/kelurahan, dimana 58 dari 460 desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Kebumen sudah terkoneksi dengan jaringan internet Pemda Kebumen, meliputi 34 menggunakan jaringan *fiber optic* dan 24 desa menggunakan jaringan *wireless*. Masih ada 402 desa yang menggunakan jaringan internet mandiri, dengan kualitas koneksi internet yang bervariasi sehingga dibutuhkan kerjasama yang baik dalam bentuk pengadaan mandiri peralatan jaringan oleh desa, serta penyediaan koneksi internet oleh Dinas Kominfo Kabupaten.

Semua Kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Kebumen sudah terkoneksi jaringan internet milik Pemerintah Kabupaten Kebumen, meliputi 18 kantor kecamatan dengan jaringan kabel *fiber optic*, dan 8 kecamatan dengan jaringan *wireless*. Jaringan internet 26 kecamatan sudah cukup untuk melayani layanan elektronik masyarakat dengan kualitas yang baik, namun masih ada 8 kecamatan yang memerlukan pengembangan ke jaringan *fiber optic* untuk mengoptimalkan konektivitas.

b. Urusan Statistik

Data/informasi statistik (dokumen statistik) adalah salah satu instrumen analisis yang sangat dibutuhkan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan

perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan penentuan/perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah. Ketersediaan dokumen statistik yang baik akan memudahkan pemerintah dalam mendapatkan data potensi daerah secara umum sebagai bahan evaluasi atas kinerja/pelaksanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Pemerintah telah menginisiasi program Satu Data Indonesia dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia untuk memperkuat tata Kelola data administrasi, Lembaga serta pemerintah daerah di Indonesia. Satu Data Indonesia merupakan upaya mengintegrasikan beragam data yang ada di setiap Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah.

Permasalahan terkait penyelenggaraan urusan statistik ini adalah belum optimalnya penyediaan data statistik daerah yang terintegrasi, dapat dipertanggungjawabkan, aman, dan *up to date*. Koordinasi antarlembaga dan antar PD terkait data statistik ini juga sudah berjalan tetapi belum optimal. Meskipun kewenangan terkait pengelolaan data statistik ini sudah dibagi dan diatur melalui peraturan daerah tentang struktur organisasi dan tata kerja serta Peraturan Bupati tentang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, namun dalam pelaksanaannya masih terkendala, misalnya pada implementasi satu data Indonesia, sehingga penyediaan data statistik yang dimutakhirkan belum tersedia secara optimal.

Pada Bulan Juni 2021 telah ditetapkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Satu Data Kabupaten Kebumen, dalam Perbup tersebut mengatur tentang penyelenggaraan dan pelaksanaan Satu Data di tingkat Kabupaten Kebumen. Perangkat Daerah yang terlibat dalam penyelenggaraan Satu Data di

Kabupaten Kebumen, yaitu Badan Pusat Statistik sebagai Pembina Data, Bappeda sebagai Koordinator, DPUPR sebagai Pembina Data Spasial, BPKPD sebagai Pembina Data Keuangan, Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Walidata, dan semua Perangkat Daerah atau unit Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai produsen data. Satu Data Kebumen dapat diakses di laman *website* <https://satudata.kebumenkab.go.id/>.

c. Urusan Persandian

Capaian urusan persandian Kabupaten Kebumen dapat dilihat dari jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan Tanda Tangan Elektronik dalam komunikasi antar perangkat daerah. Berdasarkan data tahun 2024 seluruh perangkat daerah di Kabupaten Kebumen telah menggunakan *digital signature* (Tanda Tangan Elektronik) dalam komunikasi antar perangkat daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kebumen sangat memperhatikan keamanan dokumen dari pemalsuan. Berikut merupakan data penggunaan Tanda Tangan Elektronik di Kabupaten Kebumen.

Tabel 2. 5 Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Kebumen

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
PD	24	24	24	24	24
Kecamatan	26	26	26	26	26
Kelurahan	11	11	11	11	11
Desa	NA	154	330	363	423

Sumber: Satu Data Kab. Kebumen Tahun 2024

Kabupaten Kebumen telah memiliki *Tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT)* atau Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 488/176 yang diresmikan oleh Bupati Kebumen dan Direktur Penanggulangan dan Pemulihan Pemerintah, Badan Siber dan Sandi Negara pada 2 Juni

2021. Pada kegiatan peresmian tersebut juga telah dilakukan penerbitan Tanda Tangan Elektronik (TTE) bagi Kepala Desa (Kades) dan Lurah yang nantinya dapat digunakan oleh untuk melakukan TTE pada layanan administrasi yang ada di desa/kelurahan. Adapun layanan administrasi desa tersebut disediakan melalui aplikasi desa *online* kebumen. Saat ini telah diterbitkan TTE bagi 434 Desa dan Kelurahan di Kebumen. Monitoring penggunaan TTE di dapat diakses melalui laman <https://sitektonik.kebumenkab.go.id/>. Tingkat capaian kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen berdasarkan sasaran/target Renstra Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen periode 2021-2024 dapat dilihat dari Tabel 2.6.

Tabel 2. 6 Pencapaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota																					
	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00*	100,00*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00*	100,00*
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik																					
	Indeks PPID				20,90	25,88	30,20	34,51	38,82	43,14	20,90	25,88	32,16	34,51	38,82*	43,14*	100,00	100,00	106,49	100,00	100,00*	100,00*
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika																					
	Nilai Domain Layanan SPBE dalam Penilaian Indeks SPBE				3,86	3,85	3,85	3,86	3,86	3,87	4,00	4,39	4,44	4,94	4,94*	4,94*	103,63	114,02	115,02	127,98	127,98*	127,65*
4	Program Penyelenggara Statistik Sektoral																					
	Persentase PD yang mengisi website Satu Data sesuai SOP				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00*	100,00*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00*	100,00*
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi																					
	Persentase desa yang menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam layanan administrasi desa				16,74	38,91	61,30	83,48	100,00	100,00	17,39	39,56	70,62	94,35	100,00*	100,00*	103,88	101,67	115,25	113,02	100,00*	100,00*
	Rata-Rata				48,30	53,73	59,07	64,37	68,54	69,40	48,46	53,97	61,44	66,76	68,75	69,62	101,50	103,14	107,35	108,20	105,60	105,53

Berdasarkan Tabel 2.6, seluruh target pelayanan program Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen telah tercapai. Jika dibandingkan dengan target Renstra Dinas Kominfo Kab. Kebumen Tahun 2021-2026, capaian kinerja Dinas Kominfo menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian rata-rata program di atas 100%. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan adalah:

- 1) Pegawai yang kompeten, profesional, dan memiliki keahlian yang sesuai dengan bidang tugasnya;
- 2) Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang modern dan memadai;
- 3) Keberadaan aturan seperti UU KIP, Perpres SPBE, dan kebijakan daerah (Perda/Perbup) yang mendukung peran Dinas Kominfo.

Adapun permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya adalah:

- 1) Pedoman formal untuk manajemen SPBE belum optimal;
 - 2) Masih rendahnya kualitas pengelolaan data di seluruh perangkat daerah serta terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola dan penganalisis data;
 - 3) Tingkat kesadaran dan pemahaman terhadap keamanan data dan kerahasiaan informasi masih rendah.
- .

Tabel 2. 7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen

Uraian	Anggaran (dalam ribuan)						Realisasi Anggaran (dalam ribuan)						Persentase antara Realisasi dan Anggaran (%)					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dinas Komunikasi dan Informatika	12.407.502.000	10.046.457.000	13.937.555.000	10.855.338.000	11.703.078.000	10.002.505.605	11.534.789.963	9.497.384.926	13.569.869.922	10.474.540.945	-	-	92,97	94,53	97,36	96,49	-	-
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota	5.315.811.000	5.420.035.000	4.962.087.000	4.533.097.000	4.667.874.000	5.804.906.605	4.813.180.831	4.974.864.564	4.714.602.927	4.246.770.101	-	-	90,54	91,79	95,01	93,68	-	-
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2.136.704.000	1.890.841.000	5.656.843.000	2.988.963.000	4.019.901.000	1.681.406.000	2.023.001.943	1.810.853.358	5.576.658.357	2.963.321.691	-	-	94,68	95,77	98,58	99,14	-	-
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	4.563.682.000	2.461.442.000	3.061.125.000	3.114.504.000	2.766.870.000	2.396.193.000	4.368.526.601	2.442.261.461	3.028.602.398	3.059.992.533	-	-	95,72	99,22	98,94	98,25	-	-
Program Penyelenggara Statistik Sektoral	91.929.000	86.929.000	83.500.000	55.680.000	33.746.000	34.000.000	86.016.000	85.612.254	78.746.933	51.013.321	-	-	93,57	98,49	94,31	91,62	-	-
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	299.376.000	187.210.000	174.000.000	163.094.000	214.687.000	86.000.000	244.064.588	183.793.289	171.259.307	153.443.299	-	-	81,52	98,17	98,42	94,08	-	-

Secara umum kinerja pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021-2026 masuk dalam kategori baik. Kondisi ini menggambarkan kesesuaian antara perencanaan dengan penganggaran. Deviasi realisasi keuangan yang kecil menunjukkan keefektifan program di Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pada tahun 2023 rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik yaitu 97,36% dengan rasio tertinggi pada Program Aplikasi Informatika. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Kominfo adalah:

- a) Kejelasan dan efisiensi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan;
- b) SDM yang kompeten, terlatih, dan memiliki pemahaman yang baik tentang regulasi keuangan;
- c) Program berjalan lancar dan sesuai dengan target yang ditetapkan;
- d) Penggunaan sistem dan infrastruktur yang memadai dalam pengelolaan keuangan.

Sumber utama pendanaan untuk kegiatan operasional dan program-program Dinas Kominfo bersumber dari Anggaran Belanja Pemerintah Daerah (APBD) yang digunakan untuk pengembangan infrastruktur TIK, aplikasi dan layanan publik, keamanan informasi dan pengembangan statistik.

Anggaran yang dialokasikan tahun 2021 sampai tahun 2026 mengalami penurunan. Anggaran tahun 2021 sebesar Rp12.407.502.000,- dan tahun 2026 menurun menjadi Rp10.002.505.605,- karena adanya efisiensi anggaran. Berkurangnya anggaran berdampak pada kegagalan beberapa kegiatan untuk dilaksanakan seperti gagalnya pengadaan jaringan *fiber optic* yang rencananya akan dilakukan di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Buayan, Kecamatan Kuwarasan, dan Kecamatan Adimulyo.

2.4. Mitra Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen dalam Pemberian Layanan

Dalam rangka penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen tidak dapat bekerja sendiri. Berbagai layanan yang diberikan membutuhkan sinergi, koordinasi, serta dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun daerah. Oleh karena itu, keberadaan mitra kerja menjadi faktor penting dalam memperkuat perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program serta kegiatan.

Mitra kerja Dinas Kominfo meliputi kementerian/lembaga, perangkat daerah, lembaga vertikal, media massa, operator telekomunikasi, perguruan tinggi, komunitas masyarakat, serta penyedia layanan teknologi informasi. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mempercepat transformasi digital pemerintahan, meningkatkan keterbukaan informasi publik, memperkuat integrasi data daerah, serta menjamin keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Tabel 2. 8 Mitra Dinas Kominfo Kab. Kebumen dalam Pemberian Layanan

Urusan	Mitra Utama	Peran/Hubungan Kerjasama
Komunikasi dan Informatika	- Kementerian Komdigi - Diskominfo Provinsi Jawa Tengah - Media massa (cetak, elektronik, online) - Operator telekomunikasi & <i>Internet Service Provider</i> (ISP) - Komisi Informasi Jawa Tengah - Perguruan tinggi/akademisi - Komunitas/organisasi masyarakat digital - Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Kebumen	- Pembinaan, regulasi, dan fasilitasi program digitalisasi - Penyebarluasan informasi publik - Penyediaan jaringan internet dan infrastruktur - Penguatan keterbukaan informasi publik - Sosialisasi literasi digital - Pemanfaatan aplikasi dan layanan TIK
Statistik	- Badan Informasi Geospasial - BPS Kabupaten Kebumen - Perangkat Daerah produsen data statistik sektoral - Bapperida Kabupaten Kebumen	- Pembinaan informasi geospasial - Pembinaan statistik sektoral - Penyedia data sektoral - Koordinasi antar produsen dan pengguna data

Persandian	- BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) - Diskominfo Provinsi Jawa Tengah - Perangkat Daerah di Pemkab Kebumen	- Pembinaan teknis keamanan informasi & persandian - Penyediaan tanda tangan digital & enkripsi - Pemanfaatan layanan keamanan informasi
------------	--	--

2.4 Identifikasi Permasalahan

Dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah (sesuai Permendagri 86 Tahun 2017), yang dimaksud dengan permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi nyata (realita/capaian saat ini) dengan kondisi ideal yang seharusnya terwujud, yang jika tidak segera ditangani akan menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah. Perumusan permasalahan pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen yang berkaitan dengan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 dan Laporan KLHS RPJMD sebagai berikut:

Tabel 2. 9 Perumusan Permasalahan Pelayanan Dinas Kominfo Kab. Kebumen

Urusan	Kondisi Realita (Capaian)	Kondisi Ideal (Seharusnya)	Rumusan Permasalahan
Komunikasi dan Informatika	- Layanan komunikasi publik, media informasi, dan pemanfaatan TIK sudah berjalan, tetapi belum merata; - Infrastruktur internet belum optimal, dan koordinasi antar PD belum optimal.	- Layanan komunikasi dan informatika yang cepat, merata, transparan, mudah diakses, serta berbasis teknologi digital terintegrasi di seluruh PD dan menjangkau seluruh masyarakat.	- Belum optimalnya layanan komunikasi dan informatika.
Statistik	- Pengelolaan data sektoral sudah berjalan, namun validitas, keterpaduan, dan pemanfaatan antar-PD masih rendah; - Kurang maksimalnya produsen data dalam pengisian portal Satu Data Kebumen - Implementasi Satu Data Indonesia belum sepenuhnya berjalan.	- Data statistik sektoral yang valid, akurat, mutakhir, terpadu, mudah diakses, dan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah.	- Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data statistik sektoral daerah.

Urusan	Kondisi Realita (Capaian)	Kondisi Ideal (Seharusnya)	Rumusan Permasalahan
Persandian	- Sistem keamanan informasi mulai diterapkan, tetapi perangkat keamanan masih terbatas; - Kesadaran aparatur rendah, serta SDM dan anggaran terbatas.	- Penyelenggaraan keamanan informasi dan persandian yang kuat dengan perangkat keamanan yang memadai dengan SDM kompeten, dan sadarnya PD dalam keamanan informasi	- Belum optimalnya penyelenggaraan keamanan informasi dan persandian di daerah.

2.6 Identifikasi Isu Strategis

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah (mengacu ke Permendagri Nomor 86 Tahun 2017), isu strategis adalah pokok-pokok permasalahan utama yang bersifat mendasar, penting, dan mendesak untuk segera ditangani oleh pemerintah daerah dalam periode perencanaan, karena sangat memengaruhi pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah.

Isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen merupakan permasalahan utama yang dihadapi, serta tantangan dan peluang yang muncul dari dinamika global, nasional, dan regional, maupun dari potensi daerah yang dimiliki. Isu strategis ini dirumuskan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dengan tetap selaras pada arah kebijakan pembangunan daerah, RPJMN 2025–2029, Renstra Kementerian Komunikasi dan Digital, serta hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Kebumen.

Tabel 2. 10 Identifikasi Isu Strategis Dinas Kominfo Kab. Kebumen

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
- Dukungan BPS sebagai pembina statistik sektoral - Forum Satu Data Daerah - Perguruan tinggi untuk riset & analisis data	Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data statistik sektoral daerah	- Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi	- Tuntutan data akurat untuk SDGs dan pembangunan berkelanjutan	- Implementasi Satu Data Indonesia, perencanaan berbasis data	- Integrasi data antar kabupaten/kota Jawa Tengah	- Perlunya penguatan pengelolaan dan pemanfaatan data sektoral untuk mendukung perencanaan berbasis bukti (<i>evidence-based policy</i>).
- Dukungan BSSN & BSR E untuk tanda tangan digital dan enkripsi - Kesadaran akan pentingnya keamanan informasi	Belum optimalnya penyelenggaraan keamanan informasi dan persandian di daerah		- Ancaman <i>cyber crime</i> dan kebocoran data	- Penguatan keamanan siber oleh BSSN dan Komdigi	- Kolaborasi antar daerah menghadapi serangan siber	- Perlunya peningkatan keamanan informasi dan persandian untuk melindungi data pemerintah daerah dan layanan digital dari ancaman siber
- Infrastruktur TIK (internet, <i>fiber optic</i>) yang berkembang - Komitmen Pemda terhadap SPBE & keterbukaan informasi - Media lokal & komunitas digital sebagai mitra	Belum optimalnya layanan komunikasi dan informatika		- Tuntutan revolusi industri 4.0 & <i>society</i> 5.0; keterbukaan informasi global	- SPBE, Transformasi Digital Indonesia 2025, UU Keterbukaan Informasi Publik	- Tuntutan <i>smart city</i> dan layanan digital antar daerah di Jateng	- Perlunya percepatan transformasi digital untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan keterbukaan informasi.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur spesifik mudah tercapai rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Dalam rangka menjalankan tugas mewujudkan tujuan dan sasaran yang sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, Dinas Komunikasi memiliki tujuan Meningkatkan tata kelola Satu Data, meningkatkan keamanan data dan informasi pembangunan serta meningkatkan digitalisasi pemerintahan. Dalam pencapaian tujuan ditetapkan sasaran yang hendak dicapai tahun 2025-2029, yaitu:

- 1) Meningkatnya keandalan data perangkat daerah dalam portal satu data;
- 2) Meningkatnya keamanan dokumen pemerintah;
- 3) Meningkatnya penyediaan akses internet kepada masyarakat;
- 4) Meningkatnya keterbukaan data dan informasi publik kepada masyarakat.

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Akhir						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatkan tata kelola Satu Data, meningkatkan keamanan data dan informasi pembangunan serta meningkatkan digitalisasi pemerintahan	Meningkatnya keandalan data perangkat daerah dalam portal satu data	Persentase Data Perangkat Daerah yang lolos validasi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		Meningkatnya keamanan dokumen pemerintah	Persentase desa dan kelurahan yang menerapkan tandatangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT		Meningkatnya penyediaan akses internet kepada masyarakat	Persentase rumah tangga dengan akses internet	89,41	89,63	89,74	89,85	89,96	90,07	
		Meningkatnya keterbukaan data dan informasi publik kepada masyarakat	Nilai keterbukaan informasi publik Badan Publik	84,13	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Penahapan pembangunan yang dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen.

Tabel 3. 2 Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kebumen TA 2026–2030

Fokus/Isu Strategis	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Statistik Sektor & Satu Data Indonesia	Memperkuat dasar penyelenggaraan statistik sektoral dan SDI	Memastikan tata kelola data berjalan sesuai prinsip SDI	Menghubungkan semua data sektoral menjadi sumber tunggal	Data digunakan nyata untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan	Memastikan kualitas dan pemanfaatan data berkelanjutan
Keamanan Informasi & Persandian	Memperkuat fondasi keamanan informasi dan persandian	Meningkatkan kapasitas aparatur pengelola keamanan informasi	Membangun sistem yang terintegrasi dan aman	Memastikan sistem aman dan digunakan secara efektif	Menjamin keamanan informasi berkelanjutan dan mendukung Satu Data Indonesia
Transformasi Digital & SPBE	Memperkuat fondasi SPBE dan perencanaan pemerintah digital	Meningkatkan kapasitas aparatur dan kepatuhan SPBE	Membangun ekosistem digital yang terintegrasi dan aman	Memastikan data dan sistem digunakan nyata untuk kebijakan dan layanan	Menjamin kualitas layanan digital dan integrasi data berkelanjutan
Keterbukaan Informasi Publik	Memperkuat dasar hukum, SOP, dan sarana layanan informasi publik	Meningkatkan kompetensi PPID dan petugas layanan informasi publik	Menyediakan informasi publik yang terstandar, mudah diakses, dan terintegrasi	Memastikan informasi publik digunakan untuk transparansi dan partisipasi masyarakat	Menjamin layanan informasi publik berkualitas, transparan, dan berkelanjutan

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Kebumen tahun 2025–2029, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis teknologi informasi, penyelenggaraan komunikasi publik yang efektif, penyediaan data statistik sektoral yang berkualitas, serta perlindungan keamanan informasi dan persandian. Untuk itu, strategi dan arah kebijakan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

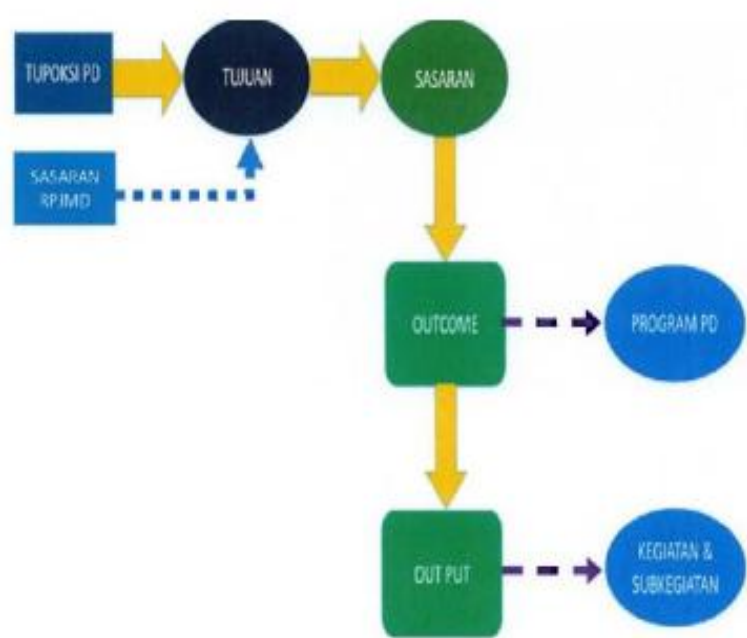
Tabel 3. 3. Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kebumen Tahun 2025-2030

Tujuan	Sasaran	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD 2025–2030	Arah Kebijakan Renstra Dinas Kominfo 2025–2030
Meningkatkan tata kelola Satu Data, meningkatkan keamanan data dan informasi pembangunan serta meningkatkan digitalisasi pemerintahan	Meningkatnya keandalan data perangkat daerah dalam portal satu data	Penyelenggaraan Satu Data Indonesia/Daerah (Perpres No. 39 Tahun 2019)	Penyediaan data pembangunan yang valid, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan	Optimalisasi pengelolaan data sektoral dan integrasi data dalam portal Satu Data
	Meningkatnya keamanan dokumen pemerintah	Penguatan Keamanan Informasi & Persandian (PP No. 71 Tahun 2019, regulasi BSSN)	Memastikan keamanan informasi pemerintahan daerah berbasis elektronik	Peningkatan Indeks Keamanan Informasi (KAMI) serta penguatan kesiapan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)
	Meningkatnya penyediaan akses internet kepada masyarakat	Penerapan SPBE (Perpres No. 95 Tahun 2018)	Mewujudkan pemerintahan berbasis digital yang terintegrasi	Peningkatan kualitas SPBE/Pemerintah Digital melalui integrasi aplikasi, penguatan pusat data, dan interoperabilitas layanan digital
	Meningkatnya keterbukaan data dan informasi publik kepada masyarakat	Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008)	Memperkuat tata kelola informasi publik yang transparan dan akuntabel	Peningkatan kualitas layanan informasi publik serta penguatan PPID agar lebih responsif dan informatif
		Pengembangan Komunikasi Publik & Media Pemerintah (Permen Kominfo No. 8 Tahun 2019)	Meningkatkan kualitas diseminasi informasi pembangunan kepada masyarakat	Penguatan peran media pemerintah daerah (TV, website, media sosial) sebagai sarana utama komunikasi publik

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Setiap level perencanaan memiliki pengertian dan peran yang berbeda, namun saling terkait dalam mencapai tujuan pembangunan. Dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilaksanakan melalui penjabaran yang sistematis ke dalam program, kegiatan, dan subkegiatan. Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil *cascading* dari tujuan, sasaran, *outcome*, dan *output* yang mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Kepmendagri No.900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Menteri Dalam Negeri. Daftar program, kegiatan dan subkegiatan dalam mencapai kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Dinas Kominfo yaitu pijakan penyusunan Renja Dinas Kominfo Tahun 2030.

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan
Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD



Tabel 4. 1 Rumusan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra Dinas Kominfo Kab. Kebumen

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah					Nilai SAKIP		
	Meningkatkan tata kelola Satu Data,meningkatkan keamanan data dan informasi pembangunan, serta meningkatkan digitalisasi pemerintahan				Indeks Pembangunan Statistik (IPS)		
		Meningkatnya keandalan data perangkat daerah dalam portal satu data			Persentase Data Perangkat Daerah yang lolos validasi		
			Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral		Predikat Domain Prinsip SDI dalam IPS	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pendukung Prinsip SDI yang lengkap	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	Subkegiatan Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
					Indeks Keamanan Informasi		
		Meningkatnya keamanan dokumen pemerintah			Persentase desa dan kelurahan yang menggunakan tandatangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan		
			Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi		Kategori Sistem Elektronik dalam Indeks KAMI	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	
				Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kesiapan Penyelenggara Sistem Elektronik	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	subkegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Subkegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT					Indeks Pelayanan Publik		
	Meningkatkan tata kelola Satu Data, meningkatkan keamanan data dan informasi pembangunan, serta meningkatkan digitalisasi pemerintahan				Indeks SPBE		
					Indeks Pemerintah Digital		
		Meningkatnya penyediaan akses internet kepada masyarakat			Presentase Rumah Tangga dengan akses Internet (%)		
			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (Bulan)	Kegiatan Administrasi Keuangan PD	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan diklat dalam satu tahun (Kegiatan)	Kegiatan Administrasi Kepegawaian PD	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
						Subkegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Bulan)	Kegiatan Administrasi Umum PD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Subkegiatan Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda (Unit)	Kegiatan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemda	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
				Penunjang Urusan Pemda			
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Subkegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Bulan)	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda (Unit)	Kegiatan Pemeliharaan BMD penunjang Urusan Pemda	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
					dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	Subkegiatan Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Pengelolaan Aplikasi Informatika		Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
				Meningkatnya Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi yang dikelola dengan baik	Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemda Kabupaten/Kota	
					Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Subkegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	Subkegiatan Koordinasi Pembangunan dan/ Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, serta Pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	
		Meningkatnya keterbukaan informasi publik Badan Publik			Nilai Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik		
			Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik		Kategori keterbukaan Informasi Publik Badan Publik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	
				Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PPID OPD dan Desa dalam keadaan baik	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan	Subkegiatan Kemitraan Komunikasi dengan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
					informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Komunitas Informasi Masyarakat	
					Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Subkegiatan Pelayanan Informasi Publik	
					Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Subkegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	

4.1. Uraian Program

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Rencana program yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan pada urusan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian adalah sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program ini mendukung kelancaran administrasi dan tata kelola internal Dinas Kominfo, yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dan 20 (dua puluh) subkegiatan. *Outcome* program ini adalah meningkatnya kualitas pelaksanaan kinerja Pemerintah Daerah, dengan 2 (dua) indikator yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah.

- 2) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas diseminasi informasi pembangunan daerah kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan transparan. *Outcome* program ini adalah meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik, dengan indikator kategori nilai keterbukaan informasi publik badan publik. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) subkegiatan.

- 3) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.

Program ini berupaya mewujudkan transformasi digital penyelenggaraan pemerintahan daerah. Fokusnya meliputi pembangunan infrastruktur teknologi informasi, pengembangan aplikasi layanan digital, serta integrasi sistem antar-PD untuk mendukung pelayanan publik yang cepat dan efisien. *Outcome* program ini adalah meningkatnya pengelolaan Aplikasi informatika, dengan indikator Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra

Pemerintah. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) subkegiatan.

4) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Program ini disusun untuk mendukung kebijakan Satu Data Kebumen. Tujuannya adalah menghasilkan data sektoral yang valid, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya program ini, perencanaan pembangunan dapat berbasis pada data yang akurat. *Outcome* program ini adalah meningkatnya penyelenggaraan statistik sektoral, dengan indikator Predikat Domain Prinsip SDI dalam IPS (Indeks Pembangunan Statistik). Program ini terdiri dari satu (1) kegiatan dan satu (1) subkegiatan.

5) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

Program ini bertujuan memperkuat keamanan informasi pemerintah daerah melalui penyelenggaraan sistem persandian, perlindungan data, dan implementasi teknologi enkripsi. *Outcome* program ini adalah meningkatnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, dengan indikator Kategori Sistem Elektronik dalam Indeks KAMI (Keamanan Informasi). Program ini terdiri dari satu (1) kegiatan dan dua (2) subkegiatan.

4.2. Uraian Kegiatan

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan pada urusan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian adalah sebagai berikut:

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 8) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 9) Pengelolaan *e-government* di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 10) Penyelenggaraan Statistik Sektorial di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;
- 11) Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

4.3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

Rencana program/kegiatan/subkegiatan dan pendanaan merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sektoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) untuk menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana program/kegiatan/sub kegiatan beserta indikator kinerja, target dan pendanaan indikatif secara rinci dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Rencana Program/ Kegiatan/ Subkeiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET .
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				9.882.505.605		10.150.743.823		10.443.356.161		10.876.449.221		11.159.175.762	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.642.193.605		5.836.080.823		6.103.611.161		6.470.869.221		6.711.986.762	
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	71	72	5.642.193.605	72,51	5.836.080.823	73,76	6.103.611.161	75	6.470.869.221	75	6.711.986.762	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	90,4	90,45		90,5		90,55		90,6		90,6		
2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				16.000.000		16.000.000		16.000.000		16.000.000		16.000.000	
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	9	8	16.000.000	8	16.000.000	8	16.000.000	8	16.000.000	8	16.000.000	
2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	5	9.000.000	5	9.000.000	5	9.000.000	5	9.000.000	5	9.000.000	
2.16.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	3	7.000.000	3	7.000.000	3	7.000.000	3	7.000.000	3	7.000.000	
2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.913.727.449		4.076.081.474		4.343.611.913		4.666.125.380		4.895.413.339	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET .
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	12	3.913.727.449	12	4.076.081.474	12	4.343.611.913	12	4.666.125.380	12	4.895.413.339	
2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.901.727.449		4.064.081.474		4.331.611.913		4.654.125.380		4.883.413.339	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	22	41	3.901.727.449	41	4.064.081.474	41	4.331.611.913	45	4.654.125.380	45	4.883.413.339	
2.16.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	12.000.000	12	12.000.000	1.212.00 0.000	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	
2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan diklat dalam satu tahun (Kegiatan)	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	
2.16.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	22	41	25.000.000	41	25.000.000	41	25.000.000	45	25.000.000	45	25.000.000	
2.16.01.2.05.00010 – Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan													
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan (Orang)												

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET .
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				59.400.000		59.400.000		59.400.000		59.400.000		59.400.000	
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Bulan)	12	12	59.400.000	12	59.400.000	12	59.400.000	12	59.400.000	12	59.400.000	
2.16.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	
2.16.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	
2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	7.000.000	12	7.000.000	12	7.000.000	12	7.000.000	12	7.000.000	
2.16.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	2.400.000	12	2.400.000	12	2.400.000	12	2.400.000	12	2.400.000	
2.16.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET .
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	12	12	8.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	
2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	
2.16.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	12	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	
2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Unit)	40	8	50.000.000	8	50.000.000	8	50.000.000	8	50.000.000	8	50.000.000	
2.16.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	40	8	50.000.000	8	50.000.000	8	50.000.000	8	50.000.000	8	50.000.000	
2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.451.320.000		1.482.852.834		1.482.852.834		1.507.598.071		1.514.427.268	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Bulan)	12	12	1.451.320.000	12	1.482.852.834	12	1.482.852.834	12	1.507.598.071	12	1.514.427.268	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET .
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.16.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.500.000	
2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				400.000.000		431.532.834		431.532.834		436.278.071		440.107.268	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	400.000.000	12	431.532.834	12	431.532.834	12	436.278.071	12	440.107.268	
2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.049.820.000		1.049.820.000		1.049.820.000		1.069.820.000		1.072.820.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.049.820.000	12	1.049.820.000	12	1.049.820.000	12	1.069.820.000	12	1.072.820.000	
2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				126.746.156		126.746.515		126.746.414		146.745.770		151.746.155	
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Unit)	31	30	126.746.156	30	126.746.515	30	126.746.414	30	146.745.770	30	151.746.155	
2.16.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				70.000.000		70.000.000		70.000.000		80.000.000		80.000.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	31	30	70.000.000	30	70.000.000	30	70.000.000	30	80.000.000	30	80.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET .
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)												
2.16.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				1.746.156		1.746.515		1.746.414		1.745.770		1.746.155	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	3	3	1.746.156	3	1.746.515	3	1.746.414	3	1.745.770	3	1.746.155	
2.16.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.000.000		25.000.000		25.000.000		35.000.000		40.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	61	16	25.000.000	16	25.000.000	16	25.000.000	16	35.000.000	16	40.000.000	
2.16.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si (Unit)	3	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				1.817.000.000		1.817.000.000		1.817.000.000		1.847.000.000		1.862.000.000	
Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Kategori keterbukaan Informasi Publik Badan Publik (Kategori)	Menuju Informatif	Informatif	1.817.000.000	Informatif	1.817.000.000	Informati f	1.817.000.000	Informa tif	1.847.000.000	Informa tif	1.862.000.000	
2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1.817.000.000		1.817.000.000		1.817.000.000		1.847.000.000		1.862.000.000	
Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PPID OPD dan Desa dalam keadaan baik (OPD dan Desa)	198	272	1.817.000.000	274	1.817.000.000	276	1.817.000.000	278	1.847.000.000	280	1.862.000.000	
2.16.02.2.01.0015 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat				52.000.000		52.000.000		52.000.000		72.000.000		82.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET .
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	11	11	52.000.000	11	52.000.000	11	52.000.000	11	72.000.000	11	82.000.000	
2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik				275.000.000		275.000.000		275.000.000		285.000.000		290.000.000	
Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	12	12	275.000.000	12	275.000.000	12	275.000.000	12	285.000.000	12	290.000.000	
2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik				1.490.000.000		1.490.000.000		1.490.000.000		1.490.000.000		1.490.000.000	
Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	6	6	1.490.000.000	6	1.490.000.000	6	1.490.000.000	6	1.490.000.000	6	1.490.000.000	
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				2.423.312.000		2.497.663.000		2.522.745.000		2.558.580.000		2.585.189.000	
Meningkatnya Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) di Tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah (%)	100	100	2.423.312.000	100	2.497.663.000	100	2.522.745.000	100	2.558.580.000	100	2.585.189.000	
2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				2.423.312.000		2.497.663.000		2.522.745.000		2.558.580.000		2.585.189.000	
Meningkatnya Pengelolaan Egovernment di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi yang dikelola dengan baik (Aplikasi)	100	105	2.423.312.000	105	2.497.663.000	105	2.522.745.000	105	2.558.580.000	105	2.585.189.000	
2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan				1.623.312.000		1.647.663.000		1.672.745.000		1.698.580.000		1.725.189.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET .
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota													
Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	50	50	1.623.312.000	50	1.647.663.000	50	1.672.745.000	50	1.698.580.000	50	1.725.189.000	
2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE				800.000.000		850.000.000		850.000.000		860.000.000		860.000.000	
Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	100	105	800.000.000	105	850.000.000	105	850.000.000	105	860.000.000	105	860.000.000	
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				34.000.000		34.000.000		34.000.000		54.000.000		60.000.000	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				34.000.000		34.000.000		34.000.000		54.000.000		60.000.000	
Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Predikat Domain Prinsip SDI dalam Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Predikat)	Baik	Baik	34.000.000	Baik	34.000.000	Sangat Baik	34.000.000	Memua skan	54.000.000	Memua skan	60.000.000	
2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				34.000.000		34.000.000		34.000.000		54.000.000		60.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET .
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Terlaksananya Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah Dokumen Pendukung Prinsip SDI yang Lengkap (Dokumen)	1	1	34.000.000	1	34.000.000	1	34.000.000	1	54.000.000	1	60.000.000	
2.20.02.2.01.0022 - Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral				34.000.000		34.000.000		34.000.000		54.000.000		60.000.000	
Terlaksananya Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Melalui Forum Satu Data Daerahl	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah (laporan)	1	1	34.000.000	1	34.000.000	1	34.000.000	1	54.000.000	1	60.000.000	
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				86.000.000		86.000.000		86.000.000		106.000.000		116.000.000	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				86.000.000		86.000.000		86.000.000		106.000.000		116.000.000	
Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Kategori Sistem Elektronik dalam Indeks KAMI (Kategori)	Tinggi	Tinggi	86.000.000	Tinggi	86.000.000	Tinggi	86.000.000	Tinggi	106.000.000	Tinggi	116.000.000	
2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				86.000.000		86.000.000		86.000.000		106.000.000		116.000.000	
Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kesiapan Penyelenggara Sistem Elektronik (Tingkat)	Cukup Baik	Cukup Baik	86.000.000	Cukup Baik	86.000.000	Cukup Baik	86.000.000	Baik	106.000.000	Baik	116.000.000	
2.21.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				21.000.000		21.000.000		21.000.000		41.000.000		41.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET .
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	2	2	21.000.000	2	21.000.000	2	21.000.000	2	41.000.000	2	41.000.000	
2.21.02.2.01.0007 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah				65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000	
Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	50	50	65.000.000	50	65.000.000	50	65.000.000	50	65.000.000	50	75.000.000	

4.4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian, telah disusun berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan. Urusan komunikasi dan informatika difokuskan pada meningkatnya penyediaan akses internet kepada masyarakat dan meningkatnya keterbukaan data dan informasi kepada masyarakat. Urusan statistik difokuskan pada meningkatnya keandalan data perangkat daerah dalam portal satu data sedangkan urusan persandian difokuskan pada meningkatnya keamanan dokumen pemerintah.

Subkegiatan Prioritas dalam mendukung program prioritas Pembangunan Daerah merupakan rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Subkegiatan Prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Pemerintah Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			Penyediaan Bahan/Material	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Pemeliharaan Mebel	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	
			Pelayanan Informasi Publik	
			Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
			Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah,	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5
			serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
			Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
			Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	

Subkegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ketentuan cukai hasil tembakau dengan pendanaan bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

4.5. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran merupakan tahapan strategis dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika. Tahapan ini berfungsi sebagai dasar pengukuran capaian kinerja perangkat daerah dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah. Melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), Dinas Kominfo berupaya memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang

dilaksanakan memiliki arah yang terukur, relevan, serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah maupun nasional.

Target indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika.

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2030

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
Meningkatkan tata kelola Satu Data, meningkatkan keamanan data dan informasi pembangunan serta meningkatkan digitalisasi pemerintahan		Indeks Keamanan Informasi (Kategori)	Cukup baik	Cukup baik	Cukup baik	Cukup baik	Cukup baik	Baik	Baik	
		Indeks Pembangunan Statistik (Indeks)	2,69	2,70	2,71	2,72	2,73	2,74	2,75	
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	4,07	4,09	4,10	4,11	4,13	4,20	4,22	
		Indeks Pemerintah Digital (Indeks)	NA	NA	2,00	2,07	2,14	2,22	2,30	
	Meningkatnya keamanan dokumen pemerintah	Persentase desa dan kelurahan yang menerapkan tandatangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan (%)	94,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Meningkatnya keandalan data perangkat daerah dalam portal satu data	Persentase Data Perangkat Daerah yang lolos validasi (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Meningkatnya penyediaan akses internet kepada masyarakat	Presentase Rumah Tangga dengan akses Internet (%)	89,41	89,52	89,63	89,74	89,85	89,96	90,07	
	Meningkatnya keterbukaan data dan informasi publik kepada masyarakat	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik (Nilai)	84,13	85,00	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2025-2045, maka untuk mencapai Transformasi Indonesia dilaksanakan melalui Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, dan Transformasi Tata Kelola.

Arah kebijakan nasional Transformasi Tata Kelola dilaksanakan dengan strategi Transformasi Digital Pemerintah (TDP), dengan indikator pencapaian melalui Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sasaran 2045 sebesar 5,00 (skala 5). Pelaksanaan Transformasi Tata Kelola pada periode tahun 2025-2029 difokuskan untuk pencapaian Asta Cita, dimana pelaksanaan TDP berupa penerapan Pemerintah Digital (Pemdi) dengan aspek berupa: 1) Penguatan tata kelola Pemdi, 2) Penguatan teknologi Pemdi, 3) Pengembangan budaya dan kompetensi digital ASN, 4) Transformasi digital layanan publik prioritas, dan 5) Penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data. Berdasarkan kondisi tersebut untuk pelaksanaan Pemdi maka perlu dipastikan penerapan kepada seluruh Instansi Pemerintah, sehingga dilakukan pengembangan Indeks SPBE menjadi Indeks Pemdi (Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital).

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) akan dilakukan penguatan kebijakan menjadi Indeks Pemerintahan Digital (Pemdi). Jumlah indikator penilaian pada SPBE sebanyak 47, dan indikator pada Pemdi sebanyak 35. Penilaian pada Tahun 2025 masih menggunakan Indeks SPBE, sedangkan mulai tahun 2026 menggunakan Indeks Pemdi.

Target Indeks SPBE Nasional di tahun 2025 adalah 3,00 (masih menggunakan indikator lama) dan target Indeks Pemdi Nasional di tahun 2026 adalah 2,00 (dengan menggunakan indikator baru). Evaluasi Indeks Pemdi akan dilakukan kembali di tahun 2028.

4.6. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah. IKK Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) RenstraDinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Perangkat Dearah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	poin	2,69	2,70	2,71	2,72	2,73	2,74	2,75
5	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	%	78,13	79,17	80,21	81,25	82,30	83,34	84,38

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029 dan selaras dengan Asta Cita, khususnya dalam penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan keamanan informasi guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Renstra ini menjadi pedoman bagi Dinas Kominfo dalam merumuskan program, kegiatan, dan subkegiatan secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.

Renstra dapat disesuaikan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional maupun daerah, dinamika sosial ekonomi masyarakat, serta kondisi lingkungan strategis lainnya. Keberhasilan pelaksanaan Renstra sangat ditentukan oleh komitmen, konsistensi, dan sinergi antara seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja menjadi instrumen penting dalam memastikan tercapainya target-target pembangunan yang telah ditetapkan.

A. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun;
2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen berkewajiban melaksanakan setiap program, kegiatan dan subkegiatan yang sudah tertuang dalam Renstra;

3. Menjalin sinergi dan koordinasi antar bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen untuk mencapai target kinerja sesuai tujuan dan sasaran dalam Renstra;
4. Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala untuk memastikan pencapaian target-target kinerja;
5. Dapat dilakukan penyesuaian perubahan Renstra sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah.

B. Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029 dilaksanakan sebagai upaya memastikan keterlaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Pengendalian dilakukan melalui pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan, baik dari sisi capaian kinerja maupun realisasi anggaran. Proses pengendalian mencakup identifikasi permasalahan, hambatan, serta faktor pendukung, sehingga dapat segera dilakukan langkah korektif untuk menjamin tercapainya sasaran pembangunan sesuai dengan rencana.

Evaluasi Renstra dilaksanakan secara periodik untuk menilai relevansi, konsistensi, efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan kebijakan, program, serta kegiatan yang telah dijalankan. Evaluasi dilakukan melalui pengukuran capaian indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kegiatan (IKK) sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Renstra, dengan membandingkan antara target dan realisasi.

Demikian Rencana strategis disusun untuk dapat digunakan sebagai pedoman perencanaan program dan kegiatan, penyusunan dokumen perencanaan/anggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan.

Kebumen, 19 September 2025

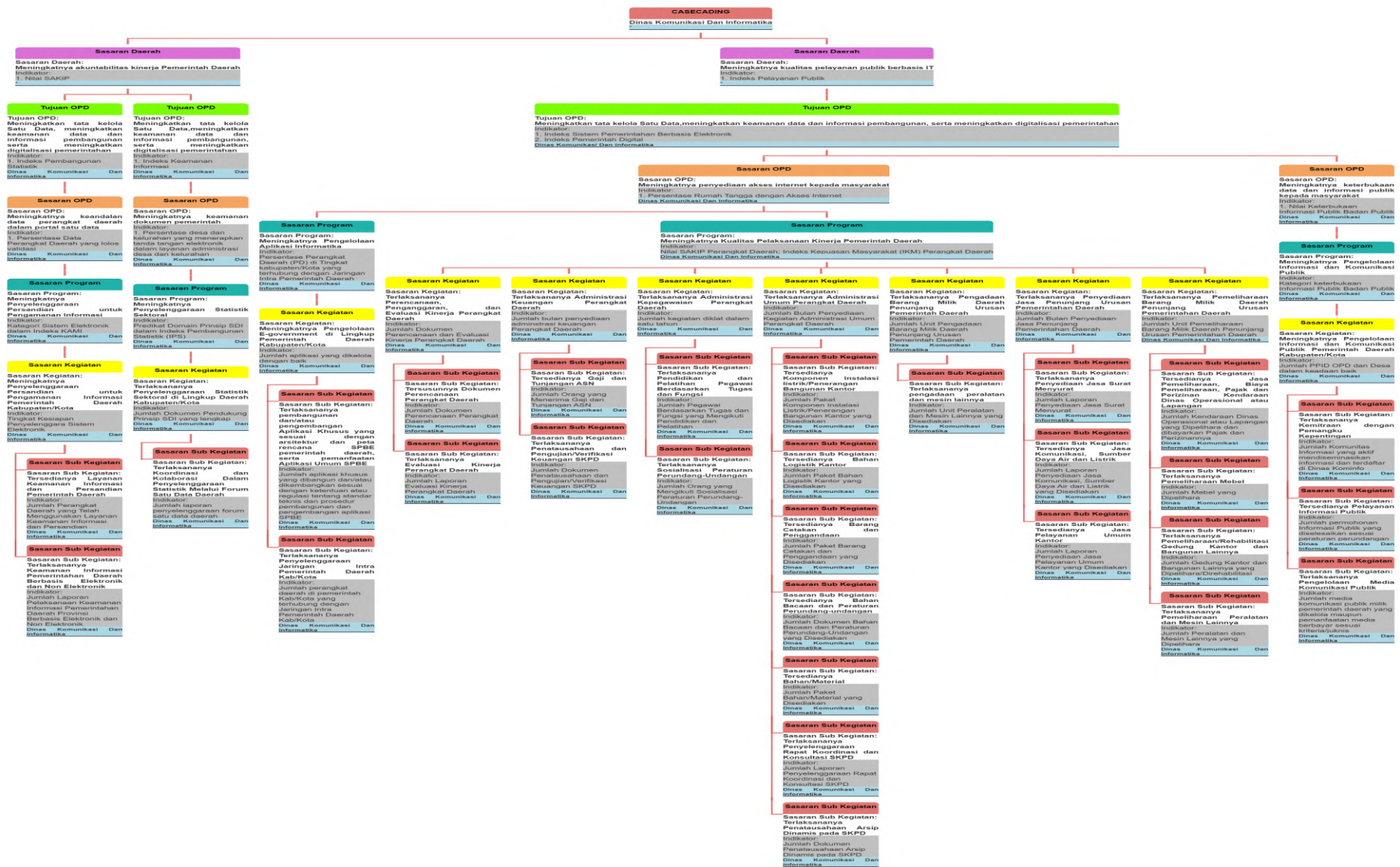
Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kebumen

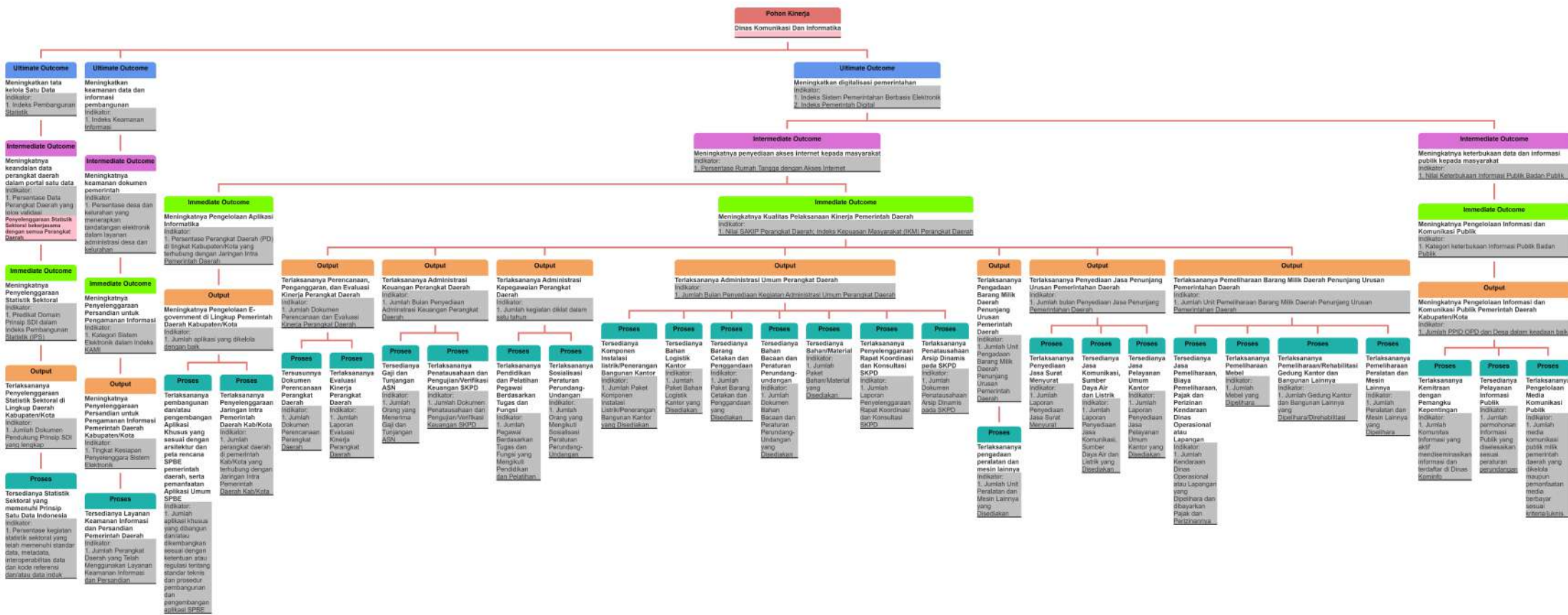

Nj. Wahyu Siswanti, S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197011071994032006

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPERIDA	
NAMA	TANDA TANGAN
Krima Karmila	
Badr Jabnun	

LAMPIRAN

Casecading Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kebumen





Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Kebumen

2026-02-26

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				10.002.505.605		10.270.743.823		10.563.356.161		11.036.449.221		11.335.175.762		
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				9.882.505.605		10.150.743.823		10.443.356.161		10.876.449.221		11.159.175.762		
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.642.193.605		5.836.080.823		6.103.611.161		6.470.869.221		6.711.986.762	
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah; Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai, Indeks)	71,00; 90,40	71,00; 90,40	72,00; 90,45		72,51; 90,50		73,76; 90,55		75,00; 90,60		75,00; 90,60		KEPALA
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					16.000.000		16.000.000		16.000.000		16.000.000		16.000.000	
	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	9	9	8		8		8		8		8		-
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000	-
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	7	6	5		5		5		5		5		-
2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000	-
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	3	3	3		3		3		3		3		-
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.913.727.449		4.076.081.474		4.343.611.913		4.666.125.380		4.895.413.339	
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan adminstrasi keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		-

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					3.901.727.449		4.064.081.474		4.331.611.913		4.654.125.380		4.883.413.339	-
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	22	28	41		41		41		45		45		-
2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000	-
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12		-
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	
	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan diklat dalam satu tahun (Dengan Satuan:Kegiatan)	1	1	1		1		1		1		1		-
2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	-
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	22	28	41		41		41		45		45		-
2.16.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					0		0		0		0		0	-
	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan (Dengan Satuan:Orang)	50	50	0		0		0		0		0		-
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					59.400.000		59.400.000		59.400.000		59.400.000		59.400.000	
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		-
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	-

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	12		12		12		12		12		-
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000	-
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	12		12		12		12		12		-
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000	-
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	12		12		12		12		12		-
2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000	-
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12		-
2.16.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material					8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000	-
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	12		12		12		12		12		-
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	-
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		-
2.16.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	-
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12		-
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Unit)	40	8	8		8		8		8		8		-
2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	-
	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	40	8	8		8		8		8		8		-
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.451.320.000		1.482.852.834		1.482.852.834		1.507.598.071		1.514.427.268	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		-
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000	-
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		-
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					400.000.000		431.532.834		431.532.834		436.278.071		440.107.268	-
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		-
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1.049.820.000		1.049.820.000		1.049.820.000		1.069.820.000		1.072.820.000	-
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		-
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					126.746.156		126.746.515		126.746.414		146.745.770		151.746.155	
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Unit)	148	148	51		51		51		51		51		-

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					70.000.000		70.000.000		70.000.000		80.000.000		80.000.000	-
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	31	30	30		30		30		30		30		-
2.16.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					1.746.156		1.746.515		1.746.414		1.745.770		1.746.155	-
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	3	3	3		3		3		3		3		-
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					25.000.000		25.000.000		25.000.000		35.000.000		40.000.000	-
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	61	80	16		16		16		16		16		-
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	-
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	3	3	3		3		3		3		3		-
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					1.817.000.000		1.817.000.000		1.817.000.000		1.847.000.000		1.862.000.000	
	Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Kategori keterbukaan Informasi Publik Badan Publik (Dengan Satuan:Kategori)	Menuju Informatif	Menuju Informatif	Informatif		Informatif		Informatif		Informatif		Informatif		KEPALA
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					1.817.000.000		1.817.000.000		1.817.000.000		1.847.000.000		1.862.000.000	
	Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PPID OPD dan Desa dalam keadaan baik (Dengan Satuan:OPD dan Desa)	198	269	272		274		276		278		280		-
2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat					52.000.000		52.000.000		52.000.000		72.000.000		82.000.000	-

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas K o m i n f o (D e n g a n Satuan:Komunitas)	11	11	11		11		11		11		11		-
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik					275.000.000		275.000.000		275.000.000		285.000.000		290.000.000	-
	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Dengan Satuan:Permohonan)	12	12	12		12		12		12		12		-
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik					1.490.000.000		1.490.000.000		1.490.000.000		1.490.000.000		1.490.000.000	-
	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Dengan Satuan:Media)	6	6	6		6		6		6		6		-
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					2.423.312.000		2.497.663.000		2.522.745.000		2.558.580.000		2.585.189.000	
	Meningkatnya Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) di Tingkat kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		KEPALA
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					2.423.312.000		2.497.663.000		2.522.745.000		2.558.580.000		2.585.189.000	
	Meningkatnya Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi yang dikelola dengan baik (Dengan Satuan:Aplikasi)	100	105	105		105		105		105		105		-
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota					1.623.312.000		1.647.663.000		1.672.745.000		1.698.580.000		1.725.189.000	-
	Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Dengan Satuan:Perangkat Daerah)	50	50	50		50		50		50		50		-

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.16.03.2.02.0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE					800.000.000		850.000.000		850.000.000		860.000.000		860.000.000	-
	Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Dengan Satuan:Aplikasi)	100	105	105		105		105		105		105		-
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				34.000.000		34.000.000		34.000.000		54.000.000		60.000.000		
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					34.000.000		34.000.000		34.000.000		54.000.000		60.000.000	
	Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Predikat Domain Prinsip SDI dalam Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Dengan Satuan:Predikat)	Baik	Baik	Baik		Baik		Sangat Baik		Memuaskan		Memuaskan		KEPALA
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					34.000.000		34.000.000		34.000.000		54.000.000		60.000.000	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendukung Prinsip SDI yang lengkap (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		-
2.20.02.2.01.0022	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral					34.000.000		34.000.000		34.000.000		54.000.000		60.000.000	-
	Terlaksananya Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Melalui Forum Satu Data Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	1		1		1		1		1		-
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				86.000.000		86.000.000		86.000.000		106.000.000		116.000.000		
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					86.000.000		86.000.000		86.000.000		106.000.000		116.000.000	
	Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Kategori Sistem Elektronik dalam Indeks KAMI (Dengan Satuan:Kategori)	Tinggi	Tinggi	Tinggi		Tinggi		Tinggi		Tinggi		Tinggi		-
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					86.000.000		86.000.000		86.000.000		106.000.000		116.000.000	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kesiapan Penyelenggara Sistem Elektronik (Dengan Satuan:Tingkat)	cukup baik	cukup baik	cukup baik		cukup baik		cukup baik		baik		baik		-
2.21.02.2.01.0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik					21.000.000		21.000.000		21.000.000		21.000.000		21.000.000	-
	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	1		1		1		1		1		-
2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah					65.000.000		65.000.000		65.000.000		85.000.000		95.000.000	-
	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Dengan Satuan:Perangkat Daerah)	50	50	50		50		50		50		50		-
			TOTAL:		10.002.505.605		10.270.743.823		10.563.356.161		11.036.449.221		11.335.175.762		



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. KH. Hasyim Asy'ari No. 6, Kode Pos 54313 Telp/Fax (0287) 383349
Laman kominfo.kebumenkab.go.id Pos-el kominfo@kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 700/1565/2025

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memperoleh informasi ukuran kinerja sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen tentang Indikator Kinerja Utama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi DJawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 227)
7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 49)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan

kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 15 September 2025

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Kebumen,



Hj. Wahyu Siswanti, S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197011071994032006

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 700/1565/TAHUN 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

- URUSAN PEMERINTAHAN : Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian
YANG DILAKSANAKAN
- TUGAS POKOK : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang berikan kepada Daerah.
- FUNGSI : a. penyusunan rencana dan program di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi;
b. perumusan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi;
d. pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi;
e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi;
f. pelaksanaan administrasi Dinas;
g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

No	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	Definisi Operasional
1	Tujuan					
	Meningkatkan tata kelola Satu Data		Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	Formulasi Pengukuran: Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan komponen penilaian: 1. Prinsip Satu Data Indonesia (bobot 28%) 2. Kualitas Data (bobot 24%) 3. Proses Bisnis Statistik (bobot 19%) 4. Kelembagaan (bobot 17%) 5. Statistik Nasional (bobot 12%) Sumber Data: Badan Pusat Statistik Penanggung Jawab: Kepala Dinas Kominfo	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) adalah nilai atau ukuran yang menggambarkan tingkat kematangan atas penyelenggaraan Statistik Sektoral yang menunjukkan kemampuan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Statistik Sektoral. IPS diperoleh dari hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS).
	Sasaran					
	Meningkatnya keandalan data perangkat		Persentase Data Perangkat	Persen	Formulasi Pengukuran: Jumlah Perangkat Daerah yang lolos validasi portal	Persentase Perangkat Daerah yang Lolos Validasi adalah persentase Perangkat

No	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	Definisi Operasional
	daerah dalam portal satu data		Daerah yang lolos validasi		satu data dibagi jumlah Perangkat Daerah dikalikan 100% Sumber Data: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Penanggung Jawab: Kepala Dinas Kominfo	Daerah yang data sektoralnya dinyatakan memenuhi kriteria validasi oleh walidata. Perangkat Daerah dinyatakan <i>lolos validasi</i> apabila data yang disampaikan telah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan validasi, termasuk kelengkapan dokumen, kesesuaian format, dan kewajaran angka.
		Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Predikat Domain Prinsip Satu Data Indonesia dalam Indeks Pembangunan Statistik	Predikat	Formulasi Pengukuran: Dihitung dari penilaian aspek pada domain Prinsip Satu Data Indonesia: 1. Standar Data (bobot 25%) 2. Metadata (bobot 25%) 3. Interoperabilitas (bobot 25%) 4. Kode Referensi (bobot 25%)	Domain Prinsip Satu Data Indonesia adalah domain pengukuran yang menggambarkan tingkat penerapan prinsip tata kelola data pemerintah dalam penyelenggaraan statistik sektoral, yang meliputi aspek Standar Data Statistik, Metadata, Interoperabilitas Data, serta penggunaan Kode Referensi dan/atau Data Induk oleh

No	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	Definisi Operasional
					Sumber Data: Badan Pusat Statistik Penanggung Jawab: Kepala Dinas Kominfo	Produsen Data di Lingkungan Pemerintah Daerah, guna menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah dibagipakaikan
2	Tujuan					
	Meningkatkan keamanan data dan informasi pembangunan		Indeks Keamanan Informasi	Kategori	Formulasi Pengukuran: Dihitung dari domain penilaian dengan masing-masing bobot maksimal nilai sebagai berikut: 1. Tata Kelola (126) 2. Pengelolaan Resiko (72) 3. Kerangka Kerja (192) 4. Pengelolaan Aset (190) 5. Teknologi dan keamanan informasi (186) 6. Pelindungan Data Pribadi (84) 7. Kategori Sistem Elektronik 8. Suplemen Sumber Data: Badan Siber dan Sandi Negara.	Indeks KAMI (Keamanan Informasi) adalah instrumen resmi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan, kematangan, dan kelengkapan penerapan keamanan informasi pada suatu organisasi, terutama instansi pemerintah, sesuai prinsip dan kontrol yang mengacu pada ISO/IEC 27001 dan regulasi nasional terkait keamanan informasi.

No	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	Definisi Operasional
					Penanggung Jawab: Kepala Dinas Kominfo	
	Sasaran					
	Meningkatnya keamanan dokumen pemerintah		Persentase desa dan kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan	Persen	Formulasi Pengukuran: Jumlah desa dan kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan dibagi jumlah desa dan kelurahan dikalikan 100% Sumber Data: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Penanggung Jawab: Kepala Dinas Kominfo	Tanda Tangan Elektronik (TTE) adalah tanda tangan yang dibuat menggunakan sistem elektronik, yang berfungsi sebagai alat verifikasi dan autentikasi identitas penandatanganan, serta menjamin keutuhan, keaslian, dan nirsangkal atas suatu dokumen digital. TTE memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah apabila memenuhi persyaratan sesuai UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, UU 19/2016 (Revisi UU ITE), PP 71/2019, dan Peraturan BSSN tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik. Dengan kata lain, TTE adalah bentuk tanda tangan modern yang

No	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	Definisi Operasional
						digunakan dalam transaksi digital, yang tidak hanya sekedar gambar tanda tangan, tetapi memiliki mekanisme kriptografi untuk memastikan keamanan dokumen.
		Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Kategori Sistem Elektronik dalam Indeks KAMI	Kategori	Formulasi Pengukuran: Dihitung dari domain penilaian: 1. Kerahasiaan 2. Integritas 3. Ketersediaan Informasi Sumber Data: Badan Siber dan Sandi Negara. Penanggung Jawab: Kepala Dinas Kominfo	Kategori Sistem Elektronik dalam Indeks KAMI ditentukan berdasarkan penilaian tingkat dampak terhadap aspek kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi apabila terjadi gangguan pada sistem elektronik.
3	Tujuan					
	Meningkatkan digitalisasi pemerintahan		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	Formulasi Pengukuran: Domain dalam penilaian SPBE terdiri dari: 1. Domain Kebijakan SPBE (bobot 13%) 2. Domain Tata Kelola SPBE (bobot 25%)	Nilai kuantitatif yang menggambarkan tingkat kematangan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada suatu instansi pemerintah.

No	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	Definisi Operasional
					3. Domain Manajemen SPBE (bobot 16,5%) 4. Domain Layanan SPBE (bobot 45,5%) Sumber Data: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Penanggung Jawab: Kepala Dinas Kominfo	Indeks komposit SPBE berdasarkan: Kepemilikan Arsitektur SPBE, Kepemilikan Peta Rencana SPBE, pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SPBE, penerapan Manajemen Layanan SPBE, Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik, Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik, Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja Berbasis Elektronik, Layanan Publik Berbasis Elektronik.
			Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	Domain dalam penilaian Indeks Pemerintah Digital terdiri dari: 1. Tata Kelola dan Manajemen (bobot 10%) 2. Penyelenggara (bobot 10%) 3. Data (bobot 15%)	Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) adalah instrumen pengukuran kinerja dan tingkat kematangan transformasi digital pemerintah yang menilai sejauh mana instansi pemerintah (pusat dan daerah) mampu

No	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	Definisi Operasional
					4. Keamanan Siber (bobot 15%) 5. Teknologi Digital (bobot 10%) 6. Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah (bobot 15%) 7. Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah (bobot 25%) Sumber Data: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Penanggung Jawab: Kepala Dinas Kominfo	memanfaatkan teknologi digital, data, dan kolaborasi lintas instansi untuk menghadirkan layanan publik yang terintegrasi, berdampak, dan berorientasi pada pengguna
	Sasaran					
	Meningkatnya penyediaan akses internet kepada masyarakat		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	Persen	Formulasi Pengukuran: Jumlah rumah tangga dengan minimal satu anggota rumah tangga yang mengakses internet dibagi total rumah tangga dikali 100%	Rumah tangga dengan akses internet merupakan rumah tangga dengan minimal terdapat satu anggota rumah tangga yang mengakses internet, baik melalui jaringan tetap atau

No	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	Definisi Operasional
					Sumber Data: Badan Pusat Statistik Penanggung Jawab: Dinas Kominfo	seluler. Rumah tangga dengan akses internet berarti bahwa internet tersedia untuk digunakan oleh semua anggota rumah tangga kapan saja
		Meningkatnya Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) di Tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persen	Pengukuran: Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah dibagi total jumlah Perangkat Daerah dikali 100% Sumber Data: Dinas Kominfo Kab. Kebumen Penanggung Jawab: Dinas Kominfo	Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah adalah Perangkat Daerah yang memiliki koneksi aktif ke jaringan intra Pemerintah Daerah yang disediakan atau difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen dan tercatat dalam pengelolaan jaringan intra Pemerintah Daerah
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Formulasi Pengukuran: Nilai SAKIP dihitung oleh Kemen PAN-RB, dengan komponen penilaian: 1. Perencanaan Kinerja (30%)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah adalah nilai hasil evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada tingkat Perangkat Daerah

No	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	Definisi Operasional
					2. Pengukuran Kinerja (30%) 3. Pelaporan Kinerja (15%) 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) Sumber Data: Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Daerah Penanggung Jawab: Kepala Dinas Kominfo	yang menggambarkan tingkat kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, serta capaian kinerja organisasi, yang diperoleh dari hasil evaluasi resmi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai	Formulasi Pengukuran: Dihitung berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat yaitu: 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Sarana dan prasarana	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah adalah nilai yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah, yang diperoleh dari hasil pengukuran secara sistematis melalui survei kepuasan masyarakat sesuai dengan pedoman dan

No	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	Definisi Operasional
					10. Penanganan pengaduan, 11. Saran dan masukan Sumber Data: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Penanggung Jawab: Dinas Kominfo	ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Meningkatnya keterbukaan data dan informasi publik kepada masyarakat		Nilai Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik	Nilai	Formulasi Pengukuran: Pembobotan Penilaian Evaluasi Monitoring Keterbukaan Informasi Publik 1. Penilaian Kuesioner bobot nilai 80% dengan aspek penilaian antara lain: Kualitas Informasi, Pelayanan Informasi, Jenis Informasi, Sarana dan Prasarana, Komitmen Organisasi dan Digitalisasi	Nilai Keterbukaan Informasi Publik adalah ukuran tingkat keterpenuhan kewajiban badan publik dalam menyediakan, mengelola, dan menyajikan informasi publik secara terbuka, akurat, mudah diakses, dan diperbarui melalui website resmi, sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pelayanan informasi publik yang baik

No	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	Definisi Operasional
					2. Penilaian Presentasi Uji Publik bobot nilai 20% dengan aspek penilaian antara lain: Inovasi, Strategi dan Klarifikasi Sumber Data: Komisi Informasi Penyiaran Penanggung Jawab: Kepala Dinas Kominfo	
		Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Kategori Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik	Kategori	Formulasi Pengukuran: Pembobotan Penilaian Evaluasi Monitoring Keterbukaan Informasi Publik 1. Penilaian Kuesioner bobot nilai 80% dengan aspek penilaian antara lain: Kualitas Informasi, Pelayanan Informasi, Jenis Informasi, Sarana dan Prasarana, Komitmen Organisasi dan Digitalisasi	Nilai Kategori adalah skor yang diperoleh Badan Publik sebagai dasar penetapan kategori keterbukaan informasi publik, yaitu: 1. Kategori Informatif, dengan nilai 90 -100 2. Kategori Menuju Informatif, dengan nilai 80-89,9 3. Kategori Cukup Informatif, dengan nilai 60-79,9

No	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	Definisi Operasional
					2. Penilaian Presentasi Uji Publik bobot nilai 20% dengan aspek penilaian antara lain: Inovasi, Strategi dan Klarifikasi Sumber Data: Komisi Informasi Penyiaran Penanggung Jawab: Kepala Dinas Kominfo	4. Kategori Kurang Informatif, dengan nilai 40-59,9 5. Kategori Tidak Informatif, dengan nilai <39,9

Kebumen, 15 September 2025

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kebumen,



Hj. Wahyu Siswanti, S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197011071994032006

HASIL KESEPAKATAN FORUM RENSTRA 2025-2029 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEBUMEN

Pada hari senin tanggal tujuh belas maret tahun dua ribu dua puluh lima telah diselenggarakan forum Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

- a. Pemaparan materi Forum Renstra 2025-2029 dan Rencana Kerja Tahun 2026 oleh Kepala Dinas Kominfo.
- b. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan oleh narasumber sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan forum Perangkat Daerah, maka pada:

Hari/Tanggal : Senin/17 Maret 2025

Jam : 13.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Aula Lantai 1

Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kebumen

Jl. Hasyim Asy'ari No.6 Kebumen

Forum Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

MENYEPAKATI

- KESATU : Isu strategis (pelayanan) Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pelayanan rancangan Renstra Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.
- KEDUA : Rencana program, kegiatan dan sub-kegiatan prioritas Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.
- KETIGA : Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini.
- KEEMPAT : Hasil kesepakatan forum Renstra Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN V yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari berita acara ini.

KELIMA

Berita acara ini beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 17 Maret 2025

Pimpinan Sidang

Kepala Dinas Komunikasi dan

Informatika



SUKAMTO, S.Sos, M.T.

Menyetujui,
Wakil Peserta Forum RENSTRA 2025-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kebumen Tahun 2025

NO	NAMA	UNSUR PERWAKILAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Kurniawan	Komisi A DPRD Kebumen	Jl. Merdeka No. 7 Kebumen	
2.	Budi Jatmiko, S.Pd., M.Pd	BAPPEDA	Jl. Pahlawan No. 138 Kebumen	
3.	Dra. Unik Ganiwati	Kecamatan Adimulyo	Kemujan, Kec. Adumilyo, Kebumen	
4.	Ari Subowo	Universitas Putra Bangsa Kebumen	Jl. Ronggowarsito No. 18 Pejagoan, Kebumen	
5.	Ondo Suprianto	PWI Kebumen	Kebumen	

Delegasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Pada Musrenbang RKPD
Kabupaten Kebumen Tahun 2026

NO	NAMA	UNSUR PERWAKILAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Ondo Suprianto	PWI Kebumen	Kebumen	



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan K.H. Hasyim Asy'ari No. 6 Kebumen, Kodepos 54312, Telepon (0287) 383349,
Faksimile: (0287) 381423, Laman: kominfo.kebumenkab.go.id, Pos-el: kominfo@kebumenkab.go.id

NOTULA

Kegiatan : Forum Renstra Tahun 2025-2029 dan Renja Tahun 2026 Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen
Hari/Tanggal : Senin/ 17 Maret 2025
Tempat : Aula Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen
Waktu : Pukul 13.00 WIB s.d. selesai
Acara : 1. Pembukaan
2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kebumen
3. Sambutan dan atau Pemaparan
4. Pembahasan/ Musyawarah/ Tanya Jawab/ Diskusi
5. Penandatanganan Berita Acara
6. Penutup

Pimpinan Forum Renstra 2025-2029 dan Renja Tahun 2026 Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Kebumen:

Ketua : Kepala Dinas Kominfo Kab.Kebumen
Sekretaris : Sekretaris Dinas Kominfo Kab. Kebumen
Pencatat : Okti Sulistyani,S.T
Peserta Forum : 25 Orang terdiri dari unsur OPD terkait, Kecamatan, Desa,
Pengelola Radio/Medsos, Wartawan, Perguruan Tinggi, KIM,
Dewan Kesenian

- : 1. Forum dibuka oleh Pembawa Acara dilanjutkan dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Mars Kebumen bersama.
2. Sambutan Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Kebumen. *Point-point* yang disampaikan sebagai berikut:
- Program 5 tahun ke depan mengacu ke RPJMD Kab. Kebumen yang saat ini masih dalam tahap proses penyusunan;
 - RPJMD mengacu pada Visi Misi Bupati Terpilih, dengan fokus menyelesaikan kemiskinan dan diterjemahkan oleh masing-masing OPD sesuai tupoksinya;
 - Perangkat Daerah mempunyai infrastruktur, sarana dan prasarana yang mendukung, dalam rangka prioritas pengurangan kemiskinan;

- Dinas Kominfo Kab.Kebumen dapat mendukung program pengentasan kemiskinan dengan menggunakan potensi yang ada seperti Medsos, TV, dan Radio dengan cara mem-*blow up* program-program kemiskinan dari Dinas lain;
- Dengan keterbatasan sumber daya yang ada, maka disusunlah Dokumen Rencana Strategis untuk menyelenggarakan program-program prioritas untuk mendukung Visi Misi Bupati Terpilih Periode 2025-2029.

3. Dilanjutkan dengan Sambutan dari Pimpinan Komisi A DPRD. Dalam sambutannya, Wakil Ketua Komisi A menyampaikan:

- Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat salah satunya adalah mengawasi demi kebaikan bersama;
- Apresiasi kepada Dinas Kominfo Kab.Kebumen yang mulai banyak berinovasi;
- Dinas Kominfo Kab.Kebumen berperan vital dalam mewujudkan Program Bupati;
- Dinas Kominfo Kab.Kebumen sesuai dengan bidang dan tugasnya harus mengikuti perkembangan zaman;
- Saat ini sedang marak dengan Program Pemerintah tentang Pemberantasan Korupsi. Korupsi tidak hanya pada anggaran, tapi juga bisa berupa korupsi waktu. Untuk itu, kita tidak boleh korupsi waktu, mari kita bangun mencari halal yang kita dapat;
- Masing-masing OPD harus sadar diri dengan tupoksinya untuk mengentaskan kemiskinan. Ke depannya bersama-sama menjalankan Visi Misi Kebumen yaitu Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya);
- Komisi A menyampaikan kesiapannya mengevaluasi untuk kesejahteraan bersama.

4. Paparan Forum Renstra 2025-2029 dan Renja Tahun 2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen disampaikan oleh Kepala Dinas Kominfo Kab. Kebumen. *Point-point* yang dipaparkan sebagai berikut:

- Dasar Hukum Penyelenggaraan Forum;
- Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
- Landasan Pengaturan dan Tupoksi Dinas Kominfo Kab. Kebumen;
- Visi Misi Daerah Tahun 2025-2029;

- Review Capaian IKU Dinas KominfoKab. Kebumen Tahun 2021-2024;
- Review Capaian Kinerja Program Dinas Kominfo Kab. Kebumen Tahun 2021-2024;
- IKU Dinas Kominfo Kab. Kebumen pada Renstra Tahun 2025-2029;
- Indikator Kinerja Program Dinas Kominfo Kab. Kebumen Tahun 2025-2029;
- Isu Strategis Dinas Kominfo Kab. Kebumen Tahun 2025-2029;
- Permasalahan Utama Renstra Dinas Kominfo Kab. Kebumen Tahun 2025-2029;
- Program Unggulan Daerah yang terkait dengan Dinas Kominfo Kab. Kebumen Tahun 2025-2029;
- Rencana Kerja Dinas Kominfo Kab. Kebumen Tahun 2026;
- Kesimpulan Paparan, sebagai berikut:
 - Renstra Dinas Kominfo mengacu pada Ranwal RPJMD 2025-2029,
 - Dinas Kominfo berkontribusi pada Misi ke-4 yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi,
 - Indikator kinerja utama Dinas Kominfo yaitu, Indeks SPBE dan Persentase rumah tangga dengan akses internet,
 - Pagu anggaran Renstra Dinas Kominfo tahun 2025-2029 total sebesar Rp 81.787.308.000,-
 - Pagu Anggaran Renja Dinas Kominfo tahun 2026 total sebesar Rp 12.636.974.000,-.

5. Forum dilanjutkan dengan tanggapan dari narasumber

a. Tanggapan dari Bappeda Kab. Kebumen:

- Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 terlambat karena RPJMD masih dalam proses;
- Draft indikator dari tujuan Dinas Kominfo Kab. Kebumen adalah Indeks SPBE, dengan dua indikator sasarannya (1) Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet dan (2) Nilai Keterbukaan Informasi Badan Publik;
- Target indikator Indeks SPBE yang semula 3,90 untuk tahun 2025 akan berubah menjadi lebih tinggi dari capaian sekarang (capaian Tahun 2024= 4,07) dan target untuk tahun 2026 sampai 2028 menyesuaikan hingga target Tahun 2029 tetap 4,20.
- Dinas Kominfo Kab. Kebumen berkontribusi pada Program Unggulan Bupati “Ngobrol dan Rembug Bareng Biyunge”. Untuk itu perlu diadakan forum

tematik sebagai langkah untuk menjawab isu-isu di Kebumen.

b. Tanggapan dari Inspektorat Kab. Kebumen:

- Pedoman Indeks Pencegahan Korupsi Daerah *Monitoring Center for Prevention* (IPKD MCP) Tahun 2025 disosialisasikan melalui website Pemda dan website Perangkat Daerah dalam rangka menjaga akuntabilitas;
- Untuk mendukung Disiplin Perangkat Desa, diharapkan Dinas Kominfo Kab. Kebumen memfasilitasi aplikasi presensi untuk sekitar 5000 Orang Perangkat Desa agar desa mampu meningkatkan kinerjanya sehingga terwujud Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya).

c. Tanggapan dari BPKPD Kab. Kebumen:

- Tujuan dan Sasaran Dinas Kominfo Kab. Kebumen ada pada Misi ke-4 yaitu yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi. Namun di era digitalisasi, semua misi ada peran Dinas Kominfo;
- Kebijakan belanja Tahun 2026 mengedepankan untuk program penting dan mendesak, dengan alokasi belanja pendidikan 20% dan belanja pegawai 30% dari total anggaran daerah. Belanja pegawai saat ini mencapai 35%, sehingga harus menurunkan sekitar 5% sampai Tahun 2027.

6. Forum dilanjutkan dengan sesi Tanya-Jawab

a. Pertanyaan dari Kecamatan Padureso

- Apakah ada bimtek PPID Desa untuk mewujudkan keterbukan informasi publik sehingga pihak Desa dapat menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat?
- Bagaimana cara menyadarkan masyarakat mampu untuk keluar dari DTKS
- Apakah Dinas Kominfo memfasilitasi aplikasi pelaksanaan Pilkades Tahun 2027(e-voting)?
- Bagaimana untuk meningkatkan penggunaan Aplikasi Srikandi (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi)?

Jawaban:

- Pembinaan PPID rutin dilaksanakan tiap tahun oleh

Dinas Kominfo Kab. Kebumen.

- Dengan sosialisasi dan pendataan ulang dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan, misalnya melalui mekanisme pengaduan jika ada yang seharusnya sudah keluar dari DTKS.
- Pilkades Berbasis Elektronik belum bisa dilaksanakan karena belum ada Perbupnya. Prinsipnya Dinas Kominfo siap memfasilitasi, karena teknologi semakin mudah dan murah.
- Untuk meningkatkan penggunaan Aplikasi Srikandi dilakukan dengan pelatihan bertahap mulai pengguna utama (arsiparis, sekretariat, bagian administrasi) sebelum melatih semua pegawai.

b. Pertanyaan dari BKPSDM Kab. Kebumen

- Apakah di perencanaan Renstra dan Renja Dinas Kominfo Kab. Kebumen ada anggaran penambahan server untuk penampungan data tata naskah kepegawaian?

Jawaban:

- Server untuk penampungan data tata naskah kepegawaian sudah ada di Dinas Kominfo Kab. Kebumen.

c. Pertanyaan dari FK Metra

- Bagaimana budaya tradisional digunakan sebagai sarana penyampaian keberhasilan informasi pembangunan?
- Apa bentuk perhatian dari pemerintah pada Komunitas budaya

Jawaban

- Dinas Kominfo Kab. Kebumen telah memfasilitasi penyelenggaraan budaya tradisional FK Metra sebagai sarana penyampaian keberhasilan informasi pembangunan sebanyak 2 kali yakni di Puring dan Prembun pada Tahun 2024.
- Wujud perhatian dari pemerintah daerah pada Komunitas budaya salah satunya dengan cara berpartisipasi dalam festival budaya FK Metra ke Tingkat Provinsi.

7. Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Renstra 2025-2029 dan Renja Tahun 2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen oleh wakil peserta:

- Wakil Komisi A DPRD oleh Kurniawan
- BAPPEDA oleh Budi Jatmiko, S.Pd.,M.Pd.
- Kecamatan Adimulyo oleh Dra Unik Ganiwati

- Universitas Putra Bangsa oleh Ari Subowo
 - PWI Kebumen oleh Ondo Supriyanto
- Delegasi Dinas Kominfo pada Musrenbang RKPD Kab. Kebumen Tahun 2026:
- PWI Kebumen oleh Ondo Supriyanto
8. Forum Renstra 2025-2029 dan Renja Tahun 2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen ditutup oleh Kepala Dinas Kominfo Kab. Kebumen.

Pimpinan Forum



Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kebumen

SUKANTO S.Sos., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196912241990011001



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. KH. Hasyim Asy'ari No. 6 Telp (0287) 383349
Email: kominfo@kebumenkab.go.id
Website: kominfo.kebumenkab.go.id Kode Pos 54312

Kebumen, 15 Maret 2025

Nomor : 000.7.2 / 230 / 2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Permohonan Narasumber

Yth. 1. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Kebumen
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen
3. Terlampir
di
Tempat

Dengan hormat, bersama ini kami mohon kesediaan/kehadiran Bapak/ibu untuk menjadi Narasumber pada:

hari/tanggal : Senin/17 Maret 2025
waktu : Pukul 13.00 WIB s/d Selesai
tempat : Aula Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen (Lt. 2).
acara : Forum Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen.
keterangan : -

Demikian, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Sukamto, S.Sos., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196912241990011001

TUJUAN SURAT

No.	Tujuan
1.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Kebumen
2.	Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen
3.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
4.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kebumen
6.	Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. KH. Hasyim Asy'ari No. 6 Telp (0287) 383349
Email: kominfo@kebumenkab.go.id
Website: kominfo.kebumenkab.go.id Kode Pos 54312

Kebumen, 15 Maret 2025

Nomor : 000.7.2 / 231 / 2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan

Yth. 1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3. Terlampir
di
Tempat

Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu pada:

hari/tanggal : Senin/17 Maret 2025
waktu : Pukul 13.00 WIB s/d Selesai
tempat : Aula Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen Lt. 2
acara : Forum Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen
keterangan : -

Demikian, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Sukamto, S.Sos., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196912241990011001

TUJUAN SURAT

No.	Tujuan
1.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2.	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kebumen
6.	Camat Adimulyo
7.	Camat Mirit
8.	Camat Padureso
9.	Camat Sadang
10.	Camat Sempor
11.	Lurah Panjer
12.	Lurah Tamanwinangun
13.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen
14.	FK METRA (Sdr. Sutim Seno Wardoyo)
15.	KIM “ Demit” Bumiharjo Klirong (Sdr. Arif Rahman)
16.	Ketua DKD Kabupaten Kebumen
17.	Pengelola Medsos Kebumen Keren
18.	GM Badan Pengelola Geopark Kebumen
19.	Ketua PWI Kabupaten Kebumen
20.	Rektor AMIK PGRI Kebumen
21.	Rektor Universitas Putra Bangsa
22.	Rektor IAINU Kebumen
23.	Direktur Radio BIMASAKTI FM
24.	Seluruh Pegawai Dinas Kominfo Kab. Kebumen
25.	Kepala Desa Lembupurwo Kec. Mirit



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan K.H. Hasyim Asy'ari No. 6 Kebumen, Kodepos 54312, Telepon (0287) 383349,
Laman: kominfo.kebumenkab.go.id, Pos-el: kominfo@kebumenkab.go.id

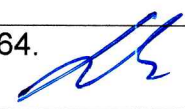
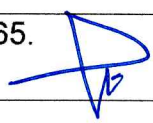
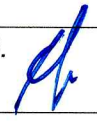
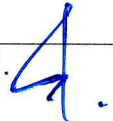
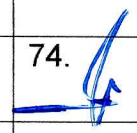
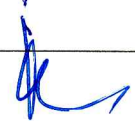
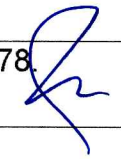
DAFTAR HADIR

Hari/ Tanggal : Senin, 17 Maret 2024
Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
Acara : Forum Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen
Tempat : Aula Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kebumen Lt.2

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	PARAF	
1.	M. ARIFIN.	St J.	1.	
2.	Ket riawan.			2.
3.	Unu s	Nda	3.	
4.	Henry Agustin	Kabid PSDM		4.
5.	Kasubh	Kesidh	5.	
6.	pansu.	sekam		6.
7.	Efit.s	Kominfo	7.	
8.	SriWulandari	OPMPTSP		8.
9.	Tofol Ai	Koinfo	9.	
10.	Ika p	Kominfo		10.
11.	Siti Komsatun	BPS	11.	
12.	Arij Soesi Lo	BPS		12.
13.	Tri Dianasari	Dinkes PPKS	13.	
14.	Unik S	Kes Atimuly		14.
15.	Nur Kholiq	Bag Org Sda	15.	

16.	Arif Widi	WINU	16.	Arif
17.	Ceko Amoro	LEMBURNO	17.	
18.	SUBITO	"	18.	
19.	ARI Subowo	UPB	19.	
20.	ENI pujirahayu	Kec. Sempur	20.	
21.	OSX priana	- " -	21.	
22.	BUDI-SONO	Kel Panjer	22.	
23.	Hien Emilia.	Distonings	23.	
24.	ARI prianto	Distonings	24.	
25.	Dwi Febrina R.	Kel. Tamannings	25.	
26.	Sigit. Sigitarto	plains pmd	26.	
27.	Caeful Ari	Nominip	27.	
28.	Ajuma	-	28.	
29.	Kun	Kaykay	29.	
30.	Deni N.	Prokopin	30.	
31.	Utado H	BPHRD	31.	
32.	Hari Salmia	Kelu Keren	32.	
33.	W. WIDORO	KEC. MIRIT	33.	
34.	Evergastu	Pui CERN	34.	
35.	f. Nuyalun	Asma Sahh fm.	35.	
36.	ARIF R	KIRU DEMIT	36.	

37.	Sutris Sun	FK mitra.	37.	
38.	Jano Khim	Diskominfo		38.
39.	OKA SULISTYANI	Diskominfo	39.	
40.	Devi Lantika	Diskominfo		40.
41.	Nugraheni	Diskominfo	41.	
42.	Mitha	—		42.
43.	Fathur R	— a —	43.	
44.	Tokun	— n —		44.
45.	Aida Rezannia	— —	45.	
46.	Hery wahyuni.			46.
47.	Evi N.		47.	
48.	Helida Haerini	—		48.
49.	Ismi Maulfa		49.	
50.	Anie Nuratama	Diskominfo		50.
51.	Anisa Seryawati	Diskominfo	51.	
52.	Feri M			52.
53.	Boori Arganto	Kominfo	53.	
54.	Ahmad Ikhlaq G	Kominfo		54.
55.	R. Izzah Rasyia W	Diskominfo	55.	
56.	Sofyan Setyo Adi P	Diskominfo		56.
57.	Ines R	— —	57.	

58.	Didik Iwara	Kominfo		58.	
59.	Kurniawan J.	Kominfo	59.		
60.	Wahyu Heri			60.	
61.	Rama Dhany		61.		
62.	Agung W.			62.	
63.	Yusuf. K		63.		
64.	Gunur M			64.	
65.	Bahrudin		65.		
66.	Desu K			66.	
67.	Adnan B		67.		
68.	Andi			68.	
69.	Agustina		69.		
70.	TURBUL			70.	
71.	Ratih.		71.		
72.	Adi Marlana			72.	
73.	Sugeng P		73.		
74.	Waldi			74.	
75.	Alizar		75.		
76.	Norita			76.	
77.	Jurane W		77.		
78.	Riska R			78.	

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	PARAF
79.	M. Tohari	staf	79. 
80.	Wahyu H		80. 

Petugas Absensi



Okti Sulistiyani, S.T.
Penata (III/c)
NIP. 198810192010012003

**Dokumentasi Forum Renstra Tahun 2025-2029 dan Forum RenjaTahun 2026
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen**











BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Ramah dan Berkeadilan



**bangga
melayani
bangsa**

FORUM RENSTRA TAHUN 2025-2029 DAN RENCANA KERJA TAHUN 2026

**Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kebumen**



Kebumen, 17 Maret 2025





BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Ramah dan Berkeadilan



**bangga
melayani
bangsa**

DASAR HUKUM Penyelenggaraan Forum



1. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya
3. PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Rendalev Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD
5. Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Renbangkeuda dan Perubahannya
6. Perda Kab Kebumen No. 4 Tahun 2021 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
7. Perda Kab Kebumen No. 7 Tahun 2021 Tentang RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026
8. SE Bupati Kebumen No. 000.7.2/789 Tahun 2025 tentang Penyusunan Ranwal Renstra PD Tahun 2025-2029, Penyusunan Ranwal RKPD Tahun 2026 serta Juklak Forum Renstra PD Tahun 2025-2029 dan Renja PD Tahun 2026



LANDASAN, TUGAS POKOK & FUNGSI DINAS KOMINFO

Landasan Hukum:

1. Perda No 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan perubahannya.
2. Perbup No 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kominfo.

Tugas:
Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang **komunikasi dan informatika**, bidang **persandian**, dan bidang **statistik** yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Fungsi:

- **Penyusunan rencana dan program** di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi;
- **Perumusan kebijakan** di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi;
- **Pelaksanaan koordinasi** di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi;
- **Pelaksanaan kebijakan** di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi;
- **Pengendalian, evaluasi dan pelaporan** di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi;
- Pelaksanaan administrasi dinas;
- Pengendalian penyelenggaraan tugas UPT pada dinas; dan
- Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Murni, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan

#bangga
melayani
bangsa

VISI MISI 2025-2029



"KEBUMEN BERDAYA"

KEBUMEN BERIMAN, MAJU,
SEJAHTERA, DAN BERBUDAYA

- 1

Mewujudkan pemenuhan hak dasar yang inklusif dan berkeadilan sertapemberdayaan pesantren dan pendidikan keagamaan
- 2

Memperkuat daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan Pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan
- 3

Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berwawasan yang berwawasan lingkungan
- 4

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngayomi, ngopeni dan ngayemi
- 5

Mewujudkan masyarakat yang damai, guyub, rukun atas dasar nilai keagamaan dan budaya lokal yang kuat



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Murni, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan

#bangga
melayani
bangsa

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dinas Kominfo Tahun 2022-2024

Review

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Indeks SPBE	Indeks SPBE	3,43	3,44	100,30	3,45	3,70	107,24	3,50	4,07	116,28
2.	Meningkatnya pengelolaan website satu data	Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Meningkatnya layanan administrasi Desa dan Kelurahan yang berbasis teknologi informasi	Persentase Desa dan Kelurahan yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa dan Kelurahan	38,91	39,56	101,67	61,30	70,65	115,25	83,48	94,35	113,02

 BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Murni dan Kompeten Beriman, Berkeadilan, Berkeadilan #bangga melayani bangsa CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2022-2024								
Review								
Program	Indikator	Target Tujuan/Sasaran Tahun ke-				Realisasi pada Tahun		
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024
Program Penunjang Urusan Pemda Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks PPID	25,88	30,20	34,51	38,82	25,88	32,16	34,51
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Nilai Domain Layanan SPBE dalam Penilaian Indeks SPBE	3,85	3,85	3,86	3,86	4,39	4,44	4,94
Program Penyelg. Statistik Sektoral	Persentase OPD yang mengisi website Satu Data sesuai SOP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Program Penyelg. Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase desa dan kelurahan yang menerapkan TTE dalam layanan administrasi desa dan kelurahan	38,91	61,3	83,48	100	39,56	70,62	94,35

Perbandingan Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2023

Pilar	Kebumen	Jawa Tengah	Nasional
Institusi	3,56	3,84	3,53
Infrastruktur	3,32	3,84	3,34
Adopsi TIK	3,45	3,84	3,46
Stabilitas Ekonomi Makro	3,5	3,84	3,58
Kesehatan	3,6	3,84	3,48
Keterampilan	3,4	3,84	3,42
Pasar Produk	3,3	3,84	3,29
Pasar Tenaga Kerja	3,35	3,84	3,31
Sistem Keuangan	3,42	3,84	3,45
Ukuran Pasar	3,38	3,84	3,37
Dinamisme Bisnis	3,28	3,84	3,28
Kapabilitas Inovasi	3,25	3,84	3,26
Skor IDSD Total	3,41	3,84	3,44

Adopsi TIK meliputi jangkauan 4G, dan tingkat penggunaan internet dan telepon seluler
 Sumber: BRIN (2023)

Perbandingan Indeks SPBE tahun 2024

Lembaga	Indeks SPBE	Predikat
Kabupaten Kebumen	4,07	Sangat Baik
Rata-Rata Kabupaten	2,45	Cukup
Rata-Rata Kota	3,39	Baik
Provinsi	3,42	Baik
Nasional	3,12	Baik
Kementerian	4,03	Sangat Baik

Sumber: Kementerian PANRB

Predikat Indeks SPBE		
NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik *)
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Perbandingan Indeks Masyarakat Digital Indonesia tahun 2024

Lembaga	IMDI	Kategori
Kabupaten Kebumen	42,47	Cukup
Provinsi Jateng	47,42	Tinggi
Nasional	43,34	Cukup

- Sangat Rendah: < 30.88
- Rendah: 30.88 - 36.27
- Cukup: 36.28 - 47.06
- Tinggi: 47.07 - 52.47
- Sangat Tinggi: > 52.47

Sumber: Kementerian Komdigi, 2024

Perbandingan Nilai Badan Publik (KIP) tahun 2024

Lembaga	Nilai KIP	Kategori
Kabupaten Kebumen	84,13	Menuju Informatif
Provinsi Jateng		Informatif
Nasional		



INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMINFO PADA RENSTRA 2025-2029

Visi Misi	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator	Target Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2025	2026	2027	2028	2029
KEBUMEN BERDAYA Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngayomi, dan ngopeni	Meningkatkan digitalisasi Pemerintahan *)		Indeks SPBE	3,90	3,98	4,00	4,13	4,20
		Meningkatnya penyediaan akses internet kepada Masyarakat	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	75,00	75,93	76,86	77,80	78,85
		Meningkatnya keterbukaan data dan informasi publik	Nilai Keterbukaan Informasi Badan Publik **)	Infor matif	Infor matif	Infor matif	Infor matif	Infor matif

NB: *) Meningkatkan digitalisasi pelaksanaan pembangunan yang merata dan bertanggungjawab (draft BAPPEDA)

**) Indeks Keterbukaan Informasi Publik (draft BAPPEDA)

Program	Indikator	Target Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
		2025	2026	2027	2028	2029
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	100	100	100
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Menuju Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Nilai Domain Layanan SPBE dalam Penilaian Indeks SPBE	3,90	3,92	3,94	3,96	3,98
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Predikat Domain Prinsip SDI dalam Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Memuaskan
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Kategori Sistem Elektronik dalam Indeks KAMI	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi





BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Murtadhi Kompeten
Harmoni yang Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

PERMASALAHAN UTAMA dalam RENSTRA 2025-2029

A. Urusan Kominfo

1. Pengembangan aplikasi harus kontinu (aplikasi harus selalu update sesuai kebutuhan).
2. Pedoman Manajemen SPBE belum tersusun secara keseluruhan.
3. Masih perlunya peningkatan jangkauan fiber optik untuk mendukung pelayanan Pemerintah Kabupaten Kebumen.
4. Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana teknologi informasi (server, sarana-prasarana).
5. Peningkatan SDM dalam bidang IT baik di Diskominfo maupun perangkat daerah.

B. Urusan Statistik

1. Kurangnya data dukung sektoral yang tersedia.
2. Adanya dokumen statistik yang tidak lagi diterbitkan di tingkat kabupaten.

C. Urusan Persandian

1. Masih diperlukan perluasan cakupan penggunaan tanda tangan elektronik hingga ke semua desa/kelurahan
2. Tidak stabilnya kondisi jaringan internet di wilayah desa khususnya yang berada di daerah pegunungan.

Sumber: Rantek RPJMD Kab. Kebumen 2025-2029

NB: Usul

- C.2 diusulkan masuk Urusan Kominfo
- B2 diusulkan dihapus



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Murtadhi Kompeten
Harmoni yang Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

PROGRAM UNGGULAN BUPATI DI DINAS KOMINFO

Ngobrol dan Rembug Bareng Biyunge

Melalui berbagai media



ANGGARAN DINAS KOMINFO KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 - 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2021	12.407.502.000	11.534.789.963	92,97
2022	10.046.457.000	9.597.384.926	95,53
2023	13.937.555.000	13.569.869.922	97,36
2024	10.855.338.000	10.474.540.945	96,49



ANGGARAN RENSTRA DINAS KOMINFO KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025 - 2029

No	Program	Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.410.665.000	4.438.873.000	6.474.350.000	6.742.240.750	7.021.544.188	7.312.762.747
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2.379.373.000	3.020.705.000	3.441.431.433	3.776.004.576	4.144.035.034	4.351.236.786
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.788.296.000	4.767.396.000	5.152.265.800	5.709.879.090	6.270.373.045	6.583.891.697
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	33.746.000	60.000.000	63.000.000	66.150.000	69.457.500	72.930.375
5	Program Penyelg. Persandian untuk Pengamanan Informasi	89.011.000	350.000.000	402.500.000	455.125.000	507.881.250	533.275.313
Jumlah		9.701.091.000	12.636.974.000	15.533.547.233	16.749.399.416	18.013.291.016	18.854.096.917

   Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	10 Dokumen	20.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	11.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	9.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan Administrasi keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	3.261.373.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/bulan	3.239.373.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	22.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah orang yang mengikuti diklat	75 Orang	75.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	75 Orang	75.000.000

   Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah	12 Bulan	86.400.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	4.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	21.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	9.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.400.000
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	10.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	30.000.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	10.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8 Unit	140.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	140.000.000

   Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan penunjang Pemerintah Daerah	12 Bulan	561.500.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.500.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	450.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	110.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjangurusan pemerintah daerah	120 Unit	243.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	90.000.000
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	3.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	50.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	100.000.000

   Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik			
Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Keterbukaan Inforasi Badan Publik	90	2.802.000.000
Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	9 Komunitas	87.000.000
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	6 Permohonan	1.065.000.000
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	6 Media	1.650.000.000

   Program Pengelolaan Aplikasi Informatika			
Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi yang dikelola dengan baik		5.026.001.000
Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	50 Perangkat Daerah	3.928.605.000
Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	100 Aplikasi	1.097.396.000

   Program Penyelenggaraan Statistik Sektor			
Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendukung Prinsip SDI yang lengkap	1 Dokumen	60.000.000
Penyelenggaraan Statistik Sektor yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	1 Laporan	60.000.000



Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kesiapan Penyelenggaraan Sistem Elektronik	Cukup Baik	361.700.000
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2 Laporan	61.700.000
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	50 Perangkat Daerah	300.000.000



KESIMPULAN

1. Renstra Dinas Kominfo mengacu pada Ranwal RPJMD 2025-2029
2. Dinas Kominfo berkontribusi pada Misi ke-4 yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi
3. Indikator kinerja utama Dinas Kominfo yaitu, Indeks SPBE dan Persentase rumah tangga dengan akses internet
4. Pagu anggaran Renstra Dinas Kominfo tahun 2025-2029 total sebesar Rp 81.787.308.000,-
5. Pagu Anggaran Renja Dinas Kominfo tahun 2026 total sebesar Rp 12.636.974.000,-

